



KEBIJAKAN TASKIN DAN IMPLEMENTASINYA

**Evaluasi Pelaksanaan Program Taskin di Provinsi Lampung
(Kasus Desa Sinar Jaya, Lampung Utara)**

KEBIJAKAN TASKIN DAN IMPLEMENTASINYA

Evaluasi Pelaksanaan Program Taskin di Provinsi Lampung
(Kasus Desa Sinar Jaya, Lampung Utara)



Penulis :
Sukri Abdurrachman



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

© 2007 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Kebijakan Taskin dan Implementasinya: Evaluasi Pelaksanaan Program Taskin di Provinsi Lampung (Kasus Desa Sinar Jaya Lampung Utara)/Sukri Abdurrachman. – Jakarta: LIPI Press, 2007.

vii + 112 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-209-5

1. Program pengentasan kemiskinan (Taskin)

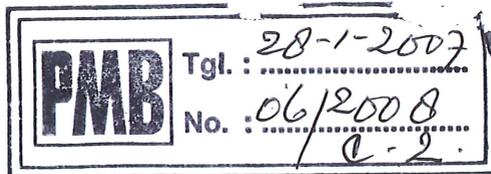
338.542

Penerbit : LIPI Press, anggota Ikapi



LIPI

*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232 Fax.: 021-5701232



KATA PENGANTAR

Upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah belum menemukan solusi terbaik yang menjadi dambaan masyarakat banyak. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah sebagai respon terhadap dampak krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan 1997 adalah melalui program JPS=Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*). Program JPS merupakan kelanjutan dari program-program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan kelompok penduduk miskin yang sudah ada sebelumnya, seperti IDT; Takesra/Kukesra; dan lain-lainnya.

Berbagai kebijakan pemerintah tentang program penanggulangan, pemberdayaan, pengentasan kelompok penduduk miskin telah banyak mengundang komentar, tanggapan, dan kritik dari berbagai kalangan yang peduli akan nasib penduduk miskin, baik mengenai pemahaman konsep maupun dalam hal cara-cara penetrapan serta kelompok yang menjadi sasarannya.

Untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang kebijakan berbagai program Taksin yang telah diupayakan pemerintah, maka PMB-LIPI pada tahun anggaran 1999/2000 melakukan penelitian di sejumlah daerah. Salah satunya di desa Sinar Jaya Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara. Buku yang ditulis oleh Sdr. Sukri Abdurrachman merupakan hasil temuan penelitian secara perorangan yang baru dapat diterbitkan pada tahun 2007, mengingat keterbatasan biaya dan berbagai persoalan yang dihadapinya.

Studi ini difokuskan pada berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah khususnya di Propinsi Lampung dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Baik mengenai konsep atau isi dari kebijakan, cara-cara mengimplementasikannya termasuk kelompok-kelompok yang menjadi sasarannya, juga dianalisa pula mengenai pandangan pejabat/aparat pemerintah dan masyarakat setempat terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan (Taksin).

Hasil studi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pusat tentang program pengentasan kemiskinan, tampak adanya usaha yang semula bersifat dari atas (*top-down*) bergeser menjadi dari bawah (*bottom-up*). Namun dalam pelaksanaannya tidak banyak mengalami perubahan. Artinya, peran masyarakat miskin belum begitu terlihat, sebaliknya peran pejabat/aparat pemerintah, baik ditingkat desa, kecamatan hingga kabupaten dan provinsi masih begitu dominan. Bahkan ditengah-tengah upaya pemerintah pusat untuk mengedepankan kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersifat *bottom-up*, Gubernur Lampung justru mengedepankan kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersifat *top-down*, seperti program MPMK-DMSS (Memantapkan Program Menghapuskan Kemiskinan – Desaku Maju Sakai Sambayan). Selain itu, kriteria desa miskin dan masyarakat miskin (kelompok sasaran) dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah. Juga masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri menurut kepentingannya, tidak terkordinir, dan lebih mengedepankan sistem pencapaian target.

Lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan yang diterapkan, seolah-olah setelah dana bantuan diberikan, selesailah tugas dari instansi pemberi bantuan, menyebabkan upaya yang dilakukan pemerintah tidak menghasilkan sesuatu yang optimal. Dari sisi masyarakat, begitu banyaknya program dana bantuan yang diberikan, menyebabkan tingkat ketergantungan masyarakat begitu tinggi, dan pemahaman masyarakat bahwa bantuan yang diberikan pemerintah adalah bantuan cuma-cuma yang tidak perlu dikembalikan atau digulirkan.

Buku ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah, terutama para perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengentasan kemiskinan.

Akhirnya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pejabat/aparat pemerintah di tingkat Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Tanjung Raja, dan Kepala Desa/Pamong

Desa serta seluruh masyarakat desa Sinar Jaya atas segala bantuan yang telah diberikan. Kritik dan saran dari para pembaca guna perbaikan buku ini dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian sejenis pada masa mendatang. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Desember 2007

Kepala Pusat Penelitian
Kemasyarakatan dan Kebudayaan –LIPI

Ttd.

Dr. M. Hisyam
NIP : 320002816

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	5
D. Pendekatan Penelitian dan Metode Pengumpulan Data.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	9
A. Kebijakan Pemerintah Pusat	9
B. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	18
BAB III KEADAAN DESA DAN KELUARGA MISKIN DI LOKASI PENELITIAN.....	29
A. Desa dan Keluarga Miskin di Provinsi Lampung	29
B. Desa dan Keluarga Miskin di Kabupaten Lampung Utara.....	30
C. Profil Kecamatan Tanjung Raja dan Pelaksanaan Program IDT	32
D. Desa Sinar Jaya “Potret Desa Miskin di Kawasan Hutan”.....	43
BAB IV PANDANGAN PEJABAT DAN APARAT TERHADAP IMPLIMENTASI KEBIJAKAN TASKIN	61

BAB V	PANDANGAN MASYARAKAT DESA SINAR TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM TASKIN	91
	A. Latar Belakang Sosial Ekonomi	91
	B. Program Bantuan Yang Pernah Diterima	95
	C. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Taskin	102
	D. Saran dan Harapan Masyarakat	104
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	107
	DAFTAR PUSTAKA..	111

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1.	Jumlah Desa Tertinggal Menurut Kabupaten/ Kotamadya di Provinsi Lampung (April 1999)	19
Tabel III.1.	Jumlah Desa IDT dan non IDT Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 1998.....	31
Tabel III.2.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-1) Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 1998	32
Tabel III.3.	Nama Desa, Klasifikasi Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Tanjung Raja.....	35
Tabel III.4.	Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Per Desa di Kecamatan Tanjung Raja Tahun 1997.....	38
Tabel III.5.	Penduduk Menurut Mata Pencaharian Utama di Kecamatan Tanjung Raja Tahun 1997.....	39
Tabel III.6.	Keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-1) Desa IDT dan Non IDT di Kecamatan Tanjung Raja Tahun 1998	42
Tabel IV.1.	Jumlah Desa IDT, Pokmas, Kepala Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin Penerima Bantuan Program IDT di Kabupaten Lampung Utara Tahun 1994/1995– 1998/1999	71
Tabel IV.2.	Jenis Usaha Yang Dikembangkan Kepala Keluarga Miskin Penerima Dana Bantuan Program IDT di Kabupaten Lampung Utara Tahun 1994/1995– 1998/1999	72

Tabel IV.3.	Jumlah Desa IDT, Pokmas, Kepala Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin Penerima Dana Bantuan Program IDT di Kecamatan Tanjung Raja Tahun 1994/1995 – 1998/1999	78
Tabel IV.4.	Jenis Usaha Yang Dikembangkan Kepala Keluarga Miskin Penerima Bantuan Program IDT di Kecamatan Tanjung Raja Tahun 1994/1995 – 1998/1999.....	79
Tabel IV.5.	Jumlah Kepala Keluarga Pra Sejahtera (PS), Keluarga Sejahtera I (KS-1), Keluarga Sejahtera II (KS-II), Keluarga Sejahtera III (KS-III), Keluarga Sejahtera III (KS-III) Plus di Kabupaten Lampung Utara Tahun 1998 dan 1999	84
Tabel V.1	Responden Menurut Kelompok Umur (N=51)	92
Tabel V.2.	Responden Menurut Pendidikan Formal (N=51)....	93
Tabel V.3	Responden Menurut Pendapatan dan Pengeluaran	94
Tabel V.4.	Pandangan Responden tentang Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Sinar Jaya (N=51)	103
Tabel V.5.	Saran dan Harapan Responden Terhadap Pelaksanaan Bantuan Masyarakat Miskin Masa Mendatang Di Desa Sinar Jaya (N=51)	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia sejak terjadi krisis ekonomi dan moneter pada pertengahan tahun 1997 adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pada masa sebelum terjadi krisis, jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 27 juta, tersebar di 20.000 lebih daerah pedesaan maupun perkotaan. Ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan, jumlah penduduk miskin bertambah tiga kali lipat, yakni mencapai 98 juta jiwa (Data Susenas 1998, dikutip dari Henny dkk, 1999:9).

Kondisi seperti ini, tidak terlepas dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru yang lebih berpihak kepada pemilik modal daripada kepentingan rakyat banyak. Selain itu, kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah Orde Baru terlalu dipusatkan di daerah perkotaan dan kurang memperhatikan pembangunan di daerah pedesaan. Hal ini mengakibatkan pembangunan di daerah pedesaan, daerah-daerah terpencil, kawasan hutan, daerah perbatasan kurang mendapat perhatian yang semestinya.

Hal lain, arah kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan pembangunan dalam bidang industri dengan menggunakan teknologi tinggi, telah pula menyebabkan berkurangnya pengembangan bidang pertanian yang digeluti hampir 80% penduduk Indonesia. Fenomena ini tidaklah mengherankan, jika ekonomi yang dibangun atas dasar pertanian rakyat terus mengalami keterpurukan. Diperparah lagi dengan banyaknya areal pertanian yang subur terutama di Pulau Jawa yang beralih fungsi peruntukkannya menjadi kawasan industri dan pemukiman penduduk. Kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan

mengabaikan aspek pemerataan, telah mengakibatkan semakin timpangnya jumlah penduduk kaya dengan penduduk miskin di Indonesia.

Begitu pula dengan masih kuatnya kebijakan pembangunan yang dilaksanakan bersifat “*top-down*” dan terlalu “*growth-oriented*” dan kurang memperhatikan secara langsung nasib golongan miskin, baik yang tinggal dan hidup di daerah pedesaan maupun perkotaan, menyebabkan penanganan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat miskin tidak tertangani sebagaimana mestinya. Karenanya pemerintah perlu mengubah arah kebijakan penanganan masyarakat miskin yang semula bersifat dari atas atau “*top-down*” menjadi yang bersifat dari bawah atau “*bottom-up*” yang ditangani secara langsung dari bawah, atas dasar kepentingan hakiki golongan ini dengan lebih mengedepankan aspirasi yang hidup di lingkungan mereka.

Menurut Dorodjatun Kuntjoro Jakti (1994:xii) nasib golongan miskin di dunia ketiga sulit diperbaiki hanya dengan mengharapkan terjadinya efek “*trickle-down*” – efek “tetesan ke bawah” dari proses pembangunan yang bersifat “*top-down*” dan “*growth-oriented*”. Karenanya, pemerintah perlu kesungguhan untuk memberikan peluang kepada golongan miskin berpartisipasi dalam merumuskan kepentingannya, sesuai dengan aspirasi dan tingkat kemampuan yang mereka miliki.

Dalam prakteknya selama ini, pelaksanaan kebijakan bersifat “*top-down*” seringkali tanpa didukung dengan pengetahuan yang baik tentang liku-liku kegiatan, kehidupan, motivasi dan aspirasi dari golongan masyarakat miskin.

B. Pokok Masalah

Kebanyakan peristiwa yang berlangsung disekitar kita bukanlah terjadi secara alami, atau sebagai sesuatu yang terjadi karena proses perkembangan yang normal, tetapi sesungguhnya kebijakan negaralah (*public policy*) yang telah memberikan warna

terhadap timbulnya peristiwa tersebut. Dengan kata lain, kebijakan negaralah yang sebenarnya banyak mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, baik kita sadari atau tidak, mengerti atau tidak (Solihin Abdul Wahab, 1997:1).

Menurut Thomas R. Dye (1978) kebijakan negara ialah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh Pemerintah. Ahli lain, W.I. Jenkins (1978:15) merumuskan kebijakan negara “ *a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should in principle, be within the power of these actors to achieve*” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Ahli lain, Chief J.O. Udjoji (1981) kebijakan negara sebagai “*an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large*” (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat).

Menurut Solihin Abdul Wahab (1997:6-7) konsep kebijakan negara membawa implikasi tertentu, yaitu: *Pertama*, kebijakan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan negara dalam sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan. *Kedua*, kebijakan negara pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri

sendiri. *Ketiga*, kebijakan negara bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, menggalakkan perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah dll. *Keempat*, kebijakan negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuk positif, kebijakan negara mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan mempengaruhi masalah tertentu, sementara dalam bentuk negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana campur tangan pemerintah diperlukan.

Hakikat kebijakan negara akan lebih baik lagi, apabila kebijakan tersebut lebih lanjut diperinci dalam beberapa kategori, yakni: tuntutan kebijakan (*policy demand*), keputusan kebijakan (*policy decision*), pernyataan kebijakan (*policy statement*), keluaran kebijakan (*policy outputs*), dan hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*).

Dalam studi ini kebijakan negara diartikan sebagai kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah pusat dan daerah dalam hal mengatasi kemiskinan.

Atas dasar uraian di atas, maka pertanyaan pokok yang ingin dijawab dalam studi ini adalah

- (1) Kebijakan apa saja yang diterapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam upaya mengatasi kemiskinan?.
- (2) Bagaimanakah cara-cara mengimplementasikan kebijakan yang di tetapkan?.
- (3) Bagaimanakah pandangan pejabat/aparat pemerintah setempat terhadap implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan?.

- (4) Bagaimanakah pandangan masyarakat di pedesaan terhadap pelaksanaan program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di desanya?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- (1) Untuk mengkaji secara lebih mendalam berbagai program kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam upaya pengentasan kemiskinan.
- (2) Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan pejabat dan aparat pemerintah di daerah Lampung terhadap implementasi berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan di daerahnya.
- (3) Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan masyarakat di pedesaan terhadap pelaksanaan berbagai program bantuan pemerintah dalam upaya mengatasi masyarakat miskin di desa Sinar Jaya.
- (4) Untuk menjelaskan situasi dan realitas sosial kultural tentang kehidupan masyarakat miskin di desa Sinar Jaya.

D. Pendekatan Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum (*legal research*) dan kebijakan, dan ilmu-ilmu sosial yang umum dilakukan, terutama yang berhubungan dengan pengetahuan penduduk setempat (*local knowledge*) hal-hal yang berkaitan dengan persoalan kemiskinan struktural. Oleh karena itu, persoalan yang diteliti lebih difokuskan pada permasalahan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mengatasi masyarakat miskin. Juga korelasi antara kebijakan yang diterapkan dengan keberhasilan dari program yang dicapai. Selain itu, latar belakang sejarah penduduk, pemukiman, pekerjaan,

keadaan sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat, serta keadaan alam lingkungan di sekitarnya, apakah juga ikut mempengaruhi kondisi masyarakat miskin.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen pada instansi pemerintah, perguruan tinggi dan lain-lain yang ada di DKI Jakarta dan di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara dan Kecamatan Tanjung Raja. Di DKI Jakarta, antara lain: PDII-LIPI, PMB-LIPI, PEP-LIPI, PPT-LIPI, UI, BPS, Kantor Menteri Negara Kependudukan/ BKKBN dan lain-lainnya. Di Bandar Lampung antara lain: Kantor Pemda Provinsi Lampung, Kanwil. Departemen Sosial Provinsi Lampung, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Lampung, Kanwil. Departemen Kehutanan Provinsi Lampung, BPS Tk. I Provinsi Lampung, BAPPEDA Provinsi Lampung, Kantor Sosial Politik Provinsi Lampung, Kanwil. BKKBN Provinsi Lampung, UNILA, Kanwil. BPS Provinsi Lampung, Kanwil. Departemen Pertanian Provinsi Lampung, Kanwil. P dan K Propinsi Lampung dllnya. Kotabumi antara lain: Kantor PemDa Kabupaten Lampung Utara, Kantor Departemen Pertanian Kabupaten Lampung Utara, Kantor BPS Kabupaten Lampung Utara, Kantor BKKBN Kabupaten Lampung Utara, Kantopr Departemen Sosial Lampung Utara, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Utara, dan Kantor Kecamatan Tanjung Raja.

Data primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam, kuiesoner, dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, yang kemudian berkembang pada saat wawancara berlangsung. Cara ini dianggap paling tepat, terutama untuk mengetahui pandangan masyarakat yang sesungguhnya akan dapat lebih terungkap melalui pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan kunci, antara lain: pejabat dan aparat pemerintah di berbagai instansi di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Tanjung Raja, Kepala Desa (termasuk RT dan RW) di desa Sinar Jaya, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat,

Tokoh Pemuda, Guru di desa Sinar Jaya, kemudian dilakukan pula penyebaran kuestioner atau daftar pertanyaan semi terbuka kepada 51 rumah tangga miskin di desa Sinar Jaya untuk mengetahui mengenai latar belakang kehidupan mereka, antara lain: umur, suku bangsa, tempat lahir, pendidikan formal dan non formal, jumlah tanggung keluarga, pekerjaan utama dan sampingan, jumlah penghasilan dan pengeluaran, kondisi tempat tinggal, kepemilikan harta benda dan luas lahan, program bantuan yang pernah diterima, pandangan terhadap berbagai program yang pernah diberikan oleh pemerintah, dan saran serta harapan untuk pelaksanaan bantuan di masa mendatang.

Selain itu, dilakukan observasi langsung di daerah penelitian, terutama untuk mengetahui secara langsung keadaan masyarakat miskin di desa Sinar Jaya, potret desa miskin di kawasan hutan lindung.

Analisa data dilakukan secara deskriptif analitis dengan menitikberatkan baik data kualitatif maupun data kuantitatif yang tersedia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini terdiri dari 6 Bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, metode pengumpulan data dan analisa data, dan sistematika penulisan.

Bab II Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah

Bagian ini menguraikan secara garis besar beberapa kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam upayanya mengatasi kemiskinan di daerahnya.

Bab III Keadaan Desa dan Keluarga Miskin di Lokasi Penelitian

Bagian ini menguraikan gambaran singkat mengenai desa dan keluarga miskin di Provinsi Lampung, desa dan keluarga miskin di Kabupaten Lampung Utara, Profil Kecamatan Tanjung Raja dan Pelaksanaan Program IDT, dan Desa Sinar Jaya “Profil Desa Miskin di Kawasan Hutan”.

Bab IV Pandangan Pejabat/Aparat Terhadap Implimentasi Kebijakan Taskin

Bagian ini menguraikan pandangan pejabat/aparat setempat mengenai implimentasi kebijakan pengentasan kemiskinan di daerahnya, diantaranya program IDT, program Takesra dan Kukesra.

Bab V Pandangan Masyarakat Desa Terhadap Pelaksanaann Program Taskin

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang kehidupan masyarakat miskin di desa Sinar Jaya, pandangan mereka tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah program bantuan mengatasi masyarakat miskin di desanya, dan saran serta harapan masyarakat setempat terhadap pelaksanaan program bantuan masyarakat miskin pada masa mendatang.

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Bagian ini menguraikan beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan dikemukakan pula beberapa saran.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

Seperti diketahui, dukungan kebijakan pemerintah (Negara) akan semakin efektif, apabila dalam pelaksanaannya dapat memperkecil kendala-kendala yang ditemukan dalam proses aplikasi. Kemungkinan munculnya hambatan tersebut, dapat diakibatkan rumusan peraturan dan kebijakan yang terlalu ideal, terlalu mengejar target atau di sebabkan kebijakan yang dibuat kurang didasari oleh kondisi danantisipasi lapangan, sehingga menyebabkan kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

Dalam bagian ini diuraikan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam upaya mengatasi kemiskinan.

A. Kebijakan Pemerintah Pusat

Di dalam UUD 1945 yang mengatur tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (Pasal 33 ayat (1)). Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3)), berarti bahwa sumber daya alam yang merupakan “ pokok-pokok kemakmuran rakyat” dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan dalam pasal 33 ayat (4) dinyatakan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Dalam penjelasan pasal 33 dikemukakan bahwa perekonomian diatur berdasarkan demokrasi ekonomi, yang artinya

kemakmuran (ditujukan) bagi semua orang, bukan hanya bagi orang-seorang atau sekelompok orang. Tidak diragukan bahwa yang dimaksud demokrasi ekonomi dalam pasal 33 UUD 1945, bukanlah sekedar cara mengatur sistem perekonomian tetapi sekaligus ditekankan pada tercapainya hasil akhir pelaksanaan sistem ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Artinya, pelaksanaan sistem ekonomi kekeluargaan yang bermoral Pancasila harus menghasilkan kemakmuran masyarakat seluruhnya secara merata. Inilah yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang makmur sekaligus pembagiannya merata (Mubyarto, 1998: 16).

Dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dikatakan “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ini berarti bahwa Negara berkepentingan untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dan dalam pasal 34 ayat (2) dinyatakan Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ini berarti negara berkewajiban menjamin dan melindungi warga masyarakat miskin, lemah, dan tidak mampu, serta anak-anak terlantar agar mereka dapat hidup layak dan sejahtera merupakan tanggungjawab negara.

Pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia, pada akhir pemerintahan Orde Lama telah menghasilkan kondisi kemiskinan “luar biasa” yang juga disebut oleh sejumlah pengamat asing sebagai “perekonomian yang hampir bangkrut”, memaksa pemerintah Orde Baru membangun ekonomi Indonesia secara berencana selama 28 tahun (1969-1997) dengan menitikberatkan pada “pertumbuhan ekonomi yang menjadi prioritas utamanya”. Kenyataannya, baik pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru, kedua-duanya diakhir

masa pemerintahannya telah menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia.

Pada masa pemerintahan Orde Baru telah dikeluarkan berbagai arah kebijakan yang muaranya untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat. Arah kebijakan pembangunan itu tertuang dalam GBHN yang setiap 5 tahun (lima) tahun sekali diadakan perbaikan, penyempurnaan dan perubahan.

Pada GBHN tahun 1993 misalnya, secara sangat kuat mengamatkan upaya pencegahan sungguh-sungguh proses berkembangnya “monopoli-oligopoli” yang mempelebar jurang perbedaan kaya-miskin, yang jika tidak dicegah akan menimbulkan keangkuhan dan kecemburuan sosial. Dalam GBHN 1993 antara lain di kemukakan “Pembangunan telah berhasil meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan rakyat pada umumnya walaupun masih ada ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang menuntut usaha yang sungguh-sungguh untuk mengatasinya agar tidak berkelanjutan dan berkembang kearah keangkuhan dan kecemburuan sosial”.

Menurut Mubyarto (1998: 22) dalam GBHN 1993, kata ekonomi rakyat dan perekonomian rakyat disebut 25 kali yang menandakan pemahaman amat besar dari MPR sebagai penjelmaan rakyat untuk mengangkat kehidupan rakyat terutama rakyat lapisan bawah yang tertinggal.

Sebagai tindak lanjut GBHN tahun 1993, pemerintah mengeluarkan Inpres no. 5 tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan atau yang lebih dikenal dengan istilah program Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Di dalam Inpres No. 5 tahun 1993 terdapat 3 pengertian dasar, yaitu:

(1) Sebagai pemicu gerakan nasional penanggulangan kemiskinan,

- (2) Sebagai strategi dalam peningkatan pemerataan melalui pembangunan sumber daya manusia pedesaan.
- (3) Sebagai upaya kongkrit mengembangkan usaha-usaha ekonomi rakyat dengan pemberian bantuan berupa modal kerja Rp.20 juta untuk setiap desa tertinggal.

Bantuan modal kerja sebesar Rp.20 juta tersebut direncanakan diberikan 3 tahun berturut-turut, dengan harapan setelah 3 tahun, melalui bimbingan dan pembinaan, masyarakat desa tertinggal dapat mencapai tahap kemandirian. Ada kemungkinan desa-desa tertinggal tertentu akan mencapai tahap mandiri lebih cepat dari 3 tahun, tetapi sebaliknya mungkin akan ada pula yang membutuhkan waktu sampai 10 tahun (BAPPENAS, 1994: 1).

Kriteria yang digunakan dalam penentuan desa tertinggal adalah:

- (1) Potensi sumber daya alam.
- (2) Kualitas sumber daya manusia.
- (3) Potensi ekonomi desa.
- (4) Akses pelayanan pendidikan, kesehatan, komunikasi, pasar dan layanan jasa lainnya.

Data dasar yang digunakan BPS dalam menentukan desa tertinggal bersumber statistik PODES (Potensi Desa). Dari hasil pendataan BPS 1994, diketahui bahwa jumlah desa tertinggal tercatat sebanyak 22.094 desa, dengan perincian 1.143 (16,4%) di daerah perkotaan dan 20.951 (83,6%) di daerah pedesaan (Anggito Abimayu, 1997: 109).

Program IDT adalah program ekonomi dengan pendekatan sosial dan moral, untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan penduduk miskin, yaitu dengan melalui pengembangan usaha-usaha produktif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga miskin. Program IDT mengupayakan pemberdayaan masyarakat, artinya tidak melalui pemberian bantuan

yang bersifat karikatif, tetapi berupa bantuan modal kerja yang makin memampukan kegiatan-kegiatan ekonomi mereka, dan akhirnya (diharapkan dapat) memandirikan mereka. Pemberdayaan masyarakat berarti pembangunan bertumpu pada kemampuan masyarakat (Mubyarto, 1998:17).

Program IDT dimulai dengan pembentukan kelompok masyarakat yang akan memperoleh bantuan. Kelompok yang dibentuk haruslah terdiri atas anggota masyarakat yang paling lemah dan paling tertinggal keadaan ekonominya, sehingga dapat bantuan dana IDT, diharapkan dapat meningkatkan sendiri taraf kesejahteraan mereka. Kepada setiap desa yang diidentifikasi sebagai desa tertinggal, diberikan bantuan sebesar Rp.20 juta sebagai modal usaha untuk mengembangkan ekonomi rakyat miskin. Dana program IDT tersebut setelah dicairkan dan diserahkan kepada kelompok dan menjadi milik kelompok, tidak akan dikembalikan lagi kepada pemerintah. Dana ini menjadi dana abadi yang seharusnya terus bergulir di daerah-daerah miskin, dan tidak dialihkan untuk peruntukan lain di luar kepentingan program pengentasan kemiskinan (Anggito Abimanyu, 1997:109).

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Isi pokok peraturan pemerintah ini adalah upaya menyeluruh dan terpadu yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pemerintah, swasta, masyarakat dan keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dicapai kondisi keluarga sejahtera. Sebagai realisasi PP No. 21 Tahun 1994, pada tahun 1996 pemerintah mengeluarkan 2 (dua) Kepres dan 1 (satu) Inpres, yaitu:

- (1) Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dana Bantuan Presiden Bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera atau yang dikenal dengan Kukesra dan Takesra.

- (2) Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1996 tentang Penyediaan Dana Bagi Penyelenggara Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra/Takesra),
- (3) Intruksi Presiden No. 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.

Tujuan umum Kukesra adalah merupakan bantuan modal kerja dalam bentuk tunai/natura yang bertujuan membantu Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (alasan ekonomi) untuk meningkatkan tahapan keluarga sejahtera melalui kegiatan ekonomi produktif dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskin.

Sedangkan tujuan khusus Kukesra adalah:

- (a) Membantu keluarga untuk mendapatkan modal usaha dengan syarat ringan, mudah dan cepat.
- (b) Merangsang kesadaran, motivasi dan semangat keluarga untuk berwirausaha.
- (c) Membantu keluarga mengembangkan kegiatan kemitraan usaha dalam bidang ekonomi.
- (d) Meningkatkan pengenalan dan pemanfaatan jasa perbankan dan pelayanan Pos oleh keluarga.

Adapun sasaran langsung Kukesra adalah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (alasan ekonomi) yang ikut serta kegiatan Takesra dan tergabung dalam wadah kelompok usaha/UPPKS, sedangkan sasaran tidak langsung adalah:

- (a) Tokoh dan institusi masyarakat (termasuk kelompok usaha yang mempunyai kegiatan ekonomi produktif) yang memiliki potensi untuk ikut memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan terhadap calon dan pengguna fasilitas Kukesra.
- (b) Instansi pemerintah, swasta, LSM dan Perbankan yang memiliki potensial untuk memberikan penyuluhan, bimbingan dan

pembinaan terhadap calon serta pengguna fasilitas Kukesra serta membantu mengembangkan program kemitraan.

- (c) Para pendukung Kukesra termasuk warga masyarakat yang peduli dan berpartisipasi aktif untuk mensukseskan kegiatan peningkatan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan umum Takesra adalah untuk meningkatkan kemandirian keluarga terutama keluarga Pra Sejahtera I dalam bidang pemupukan modal usaha melalui tabungan dengan memanfaatkan jasa pelayanan perbankan dan jasa pelayanan pos serta jasa pelayanan lain yang turut peduli terhadap kegiatan Takesra.

Sedangkan tujuan khusus Takesra adalah:

- (a) Meningkatkan kesadaran keluarga untuk gemar menabung.
- (b) Meningkatkan pengenalan dan pemanfaatan jasa perbankan dan jasa perposan oleh keluarga.
- (c) Membantu para keluarga terutama yang termasuk dalam kategori keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I agar dapat menghimpun dan guna membangun keluarganya.
- (d) Menghimpun dana masyarakat untuk mendukung pembangunan keluarga sejahtera.

Adapun sasaran langsung Takesra adalah keluarga, terutama Keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I), sedangkan sasaran tidak langsung adalah:

- (a) Tokoh dan institusi masyarakat yang memiliki potensi untuk ikut memberikan penyuluhan terhadap calon penabung dan pembinaan terhadap penabung Takesra.
- (b) Institusi pemerintah dan swasta yang memiliki potensi untuk ikut memberikan penyuluhan terhadap calon penabung dan pembinaan terhadap penabung Takesra serta membantu memperluas jangkauan pelayanan.

Program IDT maupun program Kukesra dan Takesra merupakan bantuan pemerintah yang bersifat *top-down* atau dari atas.

Krisis ekonomi Indonesia yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang disebabkan tidak kuatnya landasan ekonomi Indonesia, sehingga tidak berdaya menghadapi gejolak keuangan eksternal, juga disebabkan yang paling mendasar adalah penyelenggaraan perekonomian nasional selama 32 tahun telah mengabaikan ekonomi rakyat, mengakibatkan ketahanan ekonomi kita sangat rapuh dan tidak kompetitif yang menimbulkan ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Keadaan ini menyebabkan terjadi Sidang Istimewa MPR Th. 1998 yang salah satu hasilnya adalah ketetapan No. X tentang Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai haluan Negara atau yang bisa disebut "GBHN Mini 1998". Tap MPR No. X dianggap penting, karena krisis ekonomi telah merusak seluruh tatanan ekonomi dan keuangan nasional, dengan pengangguran dan kemiskinan yang meluas, dan mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Adapun tujuan reformasi pembangunan adalah:

- (1) Mengatasi krisis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- (2) Mewujudkan kedaulatan rakyat;
- (3) Menegakkan hukum dan perbaikan sikap mental manusia dan masyarakat;
- (4) Meletakkan dasar-dasar dan kerangka dan agenda reformasi dalam usaha mewujudkan masyarakat madani.

Agenda reformasi di bidang ekonomi adalah:

- (a) Menstabilkan nilai tukar rupiah;
- (b) Mengendalikan tingkat suku bunga dan menekan laju inflasi;
- (c) Melakukan restrukturisasi dan penyehatan perbankan;

- (d) Menyelesaikan utang-piutang swasta untuk mengembalikan citra dan kepercayaan luar negeri terhadap kredibilitas usaha nasional Indonesia;
- (e) Menyediakan pangan terutama beras yang cukup dengan harga terjangkau rakyat banyak. Golongan miskin, khususnya yang tidak memiliki daya beli menjadi prioritas utama melalui kebijakan subsidi yang terarah;
- (f) Menghidupkan kembali kegiatan produksi, terutama kegiatan-kegiatan yang berbasis pada ekonomi rakyat sebagai dasar untuk menciptakan landasan ekonomi yang kuat.

Sebagai tindak lanjut dari GBHN mini 1998, salah satu kebijakan pemerintah menetapkan program Jaringan Pengaman Sosial (JPS-*Social Safety Net*). Program JPS merupakan kelanjutan dari program-program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan kelompok penduduk miskin yang sudah ada sebelumnya, seperti IDT, P4K, Takesra/Kekesra, KUBE, PHBK, dan program-program lain yang dilaksanakan oleh LSM, sesungguhnya merupakan program JPS. Unsur utama Program ialah ada kelompok sasaran yang jelas, bersifat perlindungan/bantuan langsung, dan pemerintah mengambil sikap pemihakan yang tidak ditutup-tutupi, karena jelas program-program ini merupakan kewajiban sosial Negara terhadap setiap warga (Mubyarto, 1998:95).

Program JPS bersifat *bottom-up* yang lebih mengutamakan keinginan dan peran serta masyarakat dalam mengelola dan melaksanakan dana bantuan yang diberikan. Dengan berhasil atau bermanfaat bagi masyarakat miskin, penduduk miskin terangsang untuk percaya diri dalam mencapai tahap keswadayaan dan kemandirian. Atau sebaliknya menimbulkan masalah baru atau ketergantungan.

Hipotesis utama program ini adalah bahwa penduduk desa pada dasarnya sudah memiliki tradisi dan mekanisme “solidaritas sosial”, “tolong-menolong”, dan “balas-membalas” yang tidak

memungkinkan terjadinya orang mati kelaparan. Tradisi dan mekanisme inilah yang perlu digali dan dikembangkan agar “ketahanan sosial” dan “ketahanan pangan” masyarakat di desa miskin bisa berlangsung secara lestari.

B. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Untuk mempercepat berkurangnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung, Gubernur Provinsi Lampung telah menetapkan kebijakan daerah melalui Surat Keputusan No. G/111. A/Bappeda/Hk/1998, tanggal 28 April 1998 tentang Upaya Memantapkan Program Menghapuskan Kemiskinan (MPMK) Pola Program Terpadu Desaku Maju Sakai Sambayan (DMSS) dengan Gerakan Kembali Ke Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dasar pertimbangan dikeluarkannya kebijakan ini, *Pertama*, upaya untuk mempercepat penghapusan kemiskinan penduduk miskin di daerah Lampung yang jumlahnya menunjukkan sebesar 10.65% berdasarkan angka garis kemiskinan, dan 48,17% berdasarkan angka pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi tersebar di 758 desa tertinggal (desa IDT) atau 39,58% dari 1918 desa di Propinsi Lampung (Data Rinci Desa Tertinggal Daerah Tingkat II di Propinsi Lampung dapat dilihat Tabel II.1). *Kedua*, penanggulangan penghapusan kemiskinan dilakukan secara terpadu oleh jajaran masyarakat, baik swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat luas melalui suatu gerakan kembali ke desa.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Gubernur Provinsi Lampung mengeluarkan Instruksi No. INST/06/BAPPEDA/HK/1998, tanggal 23 April 1998 tentang Petunjuk Operasional Upaya Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK) Pola Program Terpadu Desaku Maju Sakai Sambayan (DMSS) dengan Gerakan Kembali ke desa di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Instruksi ini ditujukan kepada: Bupati/Walikota/madya KDH Tk. II se-Propinsi Lampung, Kepala Dinas/Instansi/Badan/Kantor

Wilayah di Provinsi Lampung, Camat Kepala Wilayah Kecamatan se-Provinsi Lampung dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan, untuk melaksanakan kegiatan upaya Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK) Pola Program Terpadu Desaku Maju Sakai Sambayan (DMSS) dengan Gerakan Kembali ke desa di seluruh Provinsi Lampung. Dengan kata lain, kebijakan daerah ini bersifat *top-down*. Padahal kita tahu bahwa kebijakan pemerintah pusat pada saat di keluarkan kebijakan daerah ini sedang menggalakkan pengentasan kemiskinan yang bersifat *bottom-up* melalui program JPS.

Tabel II.1
Jumlah Desa Tertinggal Menurut Kabupaten/Kotamadya
Di Provinsi Lampung (April 1999)

No.	Nama Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Desa Tertinggal	
		F	%
1.	Kabupaten lampung Utara	212	27,97
2.	Kabupaten Tanggamus	125	16,49
3.	Kabupaten Lampung Selatan	116	15,30
4.	Kabupaten Lampung Barat	105	13,85
5.	Kabupaten Tulang Bawang	102	13,46
6.	Kabupaten Lampung Tengah	95	12,53
7.	Kabupaten Bandar lampung	3	0,40
Total		758	100,00

Sumber Data: Kantor PMD Provinsi Lampung

Dalam penjelasan umum petunjuk operasional dari Instruksi Gubernur tersebut, dikemukakan bahwa masyarakat pedesaan di Provinsi Lampung pada umumnya dihadapkan pada 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu: rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan dan keterbelakangan yang pada akhirnya bermuara pada ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi permasalahan di wilayahnya.

Ketiga permasalahan ini, merupakan lingkaran masalah yang harus diterobos dengan suatu program terpadu, terarah dan berkesinambungan dalam mengatasi dan menghapus kemiskinan. Upaya terpadu itu dengan mengikutsertakan kelompok masyarakat, memperdayakan dan membantu mereka berbagai kegiatan produktif sesuai dengan potensinya. Upaya percepatan penghapusan kemiskinan dilakukan secara terus-menerus oleh kelompok masyarakat itu sendiri dengan didukung dan dibantu intervensi pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan swasta dan kelompok masyarakat yang mampu.

Untuk mengatasi kelemahan rendahnya pendidikan, upaya yang dilakukan melalui proses pemberdayaan dalam bentuk kegiatan bekerja sambil belajar "*learning by doing*" dan berbagai program intervensi pemerintah untuk pengadaan fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial ekonomi pedesaan, sehingga dapat mengubah sifat cenderung pasif, konsumtif dan rendahnya produktivitas menjadi sifat positif, aktif, produktif, maju dan semakin mandiri. Sedangkan upaya menghapus keterbelakangan sarana dan prasarana pelayanan sosial ekonomi dilakukan dengan mempercepat pembangunan berbagai fasilitas sosial ekonomi masyarakat pedesaan, sehingga sebagian wilayah potensial di pedesaan yang sukar dijangkau dan kurang dimanfaatkan secara produktif, dapat dijangkau oleh sarana transportasi dan komunikasi, serta fasilitas pelayanan umum bagi masyarakat pedesaan.

Program nyata yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, adalah mengerahkan seluruh kekuatan, daya, tenaga, pikiran dan dana pemerintah, swasta serta masyarakat sendiri untuk secara bersama, terpadu, dan terkoodinir memecahkan permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kelompok masyarakat miskin yang belum beruntung.

Upaya-upaya itu dilakukan dalam 3 (tiga) langkah strategis, yaitu:

- (1) Membangun “Inkubator” sebagai pusat pendidikan, pelatihan dan pembinaan keterampilan untuk pembentuk budaya dan jiwa/watak kewiraswatawan/kewirausahawan dan sekaligus untuk memperdayakan kelembagaan desa yang bertujuan untuk membentuk masyarakat pedesaan yang produktif, maju, mandiri dan berkesinambungan.
- (2) Membangun berbagai fasilitas pendidikan dasar yang bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan fasilitas pendidikan dasar dalam rangka untuk meningkatkan kecakapan, kreativitas, etos kerja dan pendidikan masyarakat pedesaan.
- (3) Membangun fasilitas sosial ekonomi pedesaan untuk meningkatkan keterbukaan pedesaan, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia, barang dan jasa-jasa dari dan ke pedesaan dalam upaya membentuk dan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di pedesaan.

Dalam petunjuk operasional instruksi ini dikemukakan beberapa definisi dan pengertian antara lain:

Kemiskinan didefinisikan sebagai sebagai suatu serba kekurangan dari penduduk yang terwujud dalam dan disebabkan oleh terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendidikan, pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin, dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan.

Inti permasalahan kemiskinan, baik dikota maupun di desa pada umumnya sama, yaitu kerawanan pekerjaan dan keterbelakangan.

Program DMSS-GKD adalah suatu visi penghapusan kemiskinan melalui pemberdayaan kelembagaan desa dan membangun wiraswastawan/wirausahawan desa yang mengarah pada program/kegiatan.

Penekanan program DMSS-GKD melalui gerakan pembangunan pedesaan/gerakan kembali ke desa dengan 5 dimensi tolak ukur (Panca Matra), yaitu:

- (1) Mengurangi kemiskinan;
- (2) Menghapuskan desa tertinggal;
- (3) Membentuk kewiraswastawan/kewirausahaan masyarakat pedesaan, agar ekonomi masyarakat pedesaan dapat dikembangkan lebih kuat dan lebih mampu menghadapi perubahan perekonomian makro;
- (4) Membangun dan memberdayakan kelembagaan ekonomi, sosial dan pemerintahan desa; dan
- (5) Keterpaduan program yang diarahkan untuk semakin memberdayakan masyarakat agar semakin maju, mandiri dan berkesinambungan.

Kelompok Sasaran Masyarakat Miskin atau “ Target Group” adalah kelompok masyarakat miskin di desa tertinggal dan atau keluarga Pra Sejahtera (PS) serta Keluarga Sejahtera I (KS-I) alasan ekonomi di desa.

Pokmas adalah “kelompok masyarakat” miskin di desa tertinggal yang sudah atau akan atau belum mendapat perguliran dana IDT dari desa tertinggal dan atau keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) alasan ekonomi.

Himpunan Kelompok Masyarakat (“Himpokmas” atau unit usaha otonom) adalah himpunan dari ketua-ketua Pokmas di dalam satu wilayah di desa, yang akan mengarahkan dan mengkoordinir kegiatan Pokmas secara swadaya dan swadana atau atas bantuan pemerintah. Himpunan Pokmas akan dipimpin oleh seorang manager professional.

Inkubator adalah tempat proses penetasan (pengeraman sampai penetasan), pembesaran, pembinaan, pelatihan dan pemandirian sehingga mampu terampil, mandiri, maju dan

professional serta berkesinambungan (langgeng) dalam pengembangan dan pengelolaan kegiatan produktif.

Fungsi Inkubator adalah sebagai dinamisator berbagai potensi produktif masyarakat pedesaan dan sebagai katalisator dalam upaya memperkuat keterpaduan berbagai potensi masyarakat dalam berbagai kegiatan produktif.

Adapun peranan inkubator adalah:

- (1) Sebagai proses pengeraman dan penetasan kewiraswataaan/kewirausahaan masyarakat;
- (2) Pelatihan keterampilan, kewiraswataan teknologi dan penyuluhan;
- (3) Pembinaan serta pemandirian usaha-usaha produktif masyarakat desa.

Pembinaan inkubator adalah Camat Kepala Wilayah, sedangkan pimpinan inkubator adalah petugas kecamatan yang paling senior yang berpengalaman (PPL, PLKB, dll) dengan beranggotakan tenaga-tenaga teknis di tingkat kecamatan/desa yang mampu. Sedang Pembina kecamatan adalah Kepala/Pimpinan Dinas/Instansi/Kanwil/Lembaga di Tingkat Provinsi dan Tingkat II yang ditugaskan untuk melaksanakan pembinaan dan monitoring inkubator, Hipokmas, Pokmas, dengan melakukan bimbingan serta pengarahan ataupun bantuan pembangunan kecamatan secara terpadu.

Mitra inkubator adalah wiraswastawan/wirausahawan yang berada di desa/kecamatan di wilayah tersebut yang diikutsertakan dalam membantu, mendorong, membina mitra inkubator dan pemagangan. Mitra inkubator adalah pengusaha swasta setempat atau yang berasal dari luar wilayah kecamatan/desa yang ikut melakukan pembinaan pada inkubator, dinas/instansi serta perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah.

Tujuan program MPMK pola DMSS-GKD adalah:

- (1) Meningkatkan keterpaduan program penghapusan kemiskinan di daerah dengan menetapkan kelompok sasaran masyarakat miskin yang terarah, tepat, dan jelas sarannya di desa tertinggal atau di desa tidak tertinggal;
- (2) Mempercepat penghapusan kelompok masyarakat miskin dalam kurun waktu 5 tahun (1998/1999–2002/2003) dengan menekankan sekecil mungkin keberadaan kelompok masyarakat miskin di pedesaan;
- (3) Mempercepat terbentuknya wiraswastawan/wirausahawan pedesaan atau organisasi ekonomi pedesaan untuk masyarakat desa melalui hipokmas dan pokmas, sehingga wiraswastawan/wirausahawan dapat berkembang secara professional, maju, mandiri, dan berkesinambungan;
- (4) Meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, baik di desa tertinggal atau di desa tidak tertinggal dengan bimbingan/pembinaan pemerintahan, perguruan tinggi, dan swasta, agar menjadi maju, mandiri dan berkesinambungan;
- (5) Memecahkan masalah-masalah pembangunan pedesaan, baik masalah ekonomi dan sumber daya manusia, terutama dalam rangka penghapusan kemiskinan kelompok masyarakat miskin;
- (6) Melibatkan masyarakat secara langsung untuk membantu, ikut serta dan meningkatkan kepedulian yang tinggi dari seluruh masyarakat, LSM, dan pengambil keputusan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Adapun sasaran (Target Group) dari program-program MPMK pola DMSS-GKD adalah:

- (1) Kelompok masyarakat miskin di desa tertinggal pada kecamatan yang memiliki jumlah desa tertinggal terbanyak atau apabila sudah cukup banyak kegiatan pada wilayah kecamatan tersebut, maka dapat dialihkan pada kecamatan prioritas kedua, yaitu kecamatan dengan jumlah desa tertinggal yang termasuk dalam

keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) alasan ekonomi, yang kemudian diorganisir kembali dalam bentuk “pokmas”.

- (2) Himpunan pokmas (Himpokmas) di setiap desa sasaran atau kelompok yang berkembang (Pokmas, UPPKS, Kelompok Tani dan lain-lain) untuk menjembatani “pokmas” dengan “inkubator” di setiap kecamatan sasaran.
- (3) Inkubator dilakukan dalam satu wilayah kecamatan miskin dengan jumlah desa tertinggal terbanyak atau jumlah penduduk miskin (Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera-I (KS-I) alasan ekonomi) terbanyak.

Program-program MPMK pola DMSS-GKD yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun (1998/1999-2002/2003) adalah:

- (1) Program pembinaan desa tertinggal, meliputi: pengembangan modal usaha kelompok masyarakat penerima dana IDT, peningkatan kegiatan pendampingan, peningkatan keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) dan Program Pembangunan Prasarana Jalan Poros Desa (P2JPD).
- (2) Program Pembangunan Keluarga Sejahtera (PKS), meliputi: Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera (GRKS), Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera (GEKS) dan Gerakan Keluarga Sejahtera (GKKS).
- (3) Program Kesejahteraan Sosial (Prokesos), meliputi: penyantunan penyandang cacat, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, keluarga muda mandiri, rehabilitasi daerah kumuh, peningkatan peranan wanita serta penyantunan lansia dan anak terlantar.
- (4) Program Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Padat Karya, meliputi: pendidikan, kesehatan, padat karya pedesaan, padat karya perkotaan, kehutanan dan tenaga terampil untuk mendorong ekonomi produktif dan usaha mandiri.

- (5) Program Kemitraan dan Peluang Usaha Kecil dan Menengah, meliputi: temu usaha besar dan pengusaha kecil, kemitraan usaha nasional, pembinaan usaha kemitraan. Pola kemitraan yang dikembangkan antara lain: Pola Inti Plasma, Sub Kontrak, Pola Dagang atau Waralaba.
- (6) Program pembangunan pertanian yang diarahkan khusus untuk mempercepat penghapusan kemiskinan kelompok sasaran dan dalam bentuk program regular yang sudah disepakati.
- (7) Program pembangunan pertanahan yang diarahkan untuk melakukan upaya mencari kemungkinan pendistribusian lahan tidur, baik dalam bentuk program land reform, land alokasi, bagi hasil atau yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Program pembangunan kehutanan yang diarahkan untuk melakukan upaya penelitian lahan kehutanan yang dapat dikonversikan dan dialokasikan pada kelompok sasaran dalam bentuk land reform, land alokasi atau tumpang sari, bagi hasil atau hutan kemasyarakatan.

Pelaksanaan kegiatan MPMK pola DMSS-GKD dilakukan sesuai dengan hirarkhi wilayah, yaitu: pembinaan wilayah provinsi secara menyeluruh oleh setiap unit kerja berdasarkan fungsi/tugas masing-masing unit kerja dan pembinaan wilayah secara khusus untuk program komprehesif, meliputi:

- (1) Kegiatan di Tingkat Provinsi, koordinasi dan keterpaduan seluruh program di tingkat provinsi dengan penanggungjawab Gubernur KDH Tk. I Lampung;
- (2) Kegiatan di Daerah Tingkat II, supervisi pembinaan melalui koordinasi dengan Bupati Tingkat II sebagai penanggungjawab di Tingkat II, baik sinkronisasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

- (3) Kegiatan di Kecamatan, pembinaan kecamatan oleh Tim Pembina Tk. I/Tk. II berkoordinasi dengan Camat Kepala Wilayah. Di wilayah kecamatan dibentuk inkubator kecamatan;
- (4) Kegiatan di Desa, pelaksanaan kegiatan lapangan diarahkan pada kelompok sasaran masyarakat miskin (Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I) agar tumbuh menjadi Keluarga Sejahtera II atau lebih. Di desa dibentuk Himpunan Kelompok Masyarakat.

Berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Lampung, semuanya bermuara untuk mengurangi atau menghapuskan penduduk miskin. Umumnya kebijakan pengentasan kemiskinan bersifat dari atas (*top-down*) dan mengejar target, meskipun mulai ada kecenderungan terutama kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan perubahan pola-pola pengentasan kemiskinan yang lebih bersifat dari bawah (*bottom-up*).

Mengenai tingkat keberhasilan dari berbagai pelaksanaan kebijakan tentang pengentasan kemiskinan ini dapat dilihat pada bab-bab selanjutnya.



BAB III

KEADAAN DESA DAN KELUARGA MISKIN DI LOKASI PENELITIAN

Pada bagian ini diuraikan secara singkat gambaran desa miskin dan keluarga miskin di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara, desa dan keluarga miskin di Kecamatan Tanjung Raja; dan Profil Desa Sinar Jaya “Desa Miskin di Kawasan Hutan”. Selengkapnya sebagaimana uraian berikut ini.

A. Desa dan Keluarga Miskin di Provinsi Lampung

Berdasarkan data BPS (1996), jumlah desa IDT dan non IDT di Provinsi Lampung tahun 1995 adalah berjumlah 722 desa IDT (36,24%) dan 1.270 desa non IDT (63,75%).

Desa-desanya miskin (IDT) tersebut tersebar di beberapa daerah tingkat II (kabupaten/kotamadya) dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Lampung Utara, yaitu 306 desa IDT (42,38%); disusul 239 desa IDT (31,86%) di Kabupaten Lampung Selatan; berikutnya 94 desa IDT (13,01%) di Kabupaten Lampung Tengah; 89 desa IDT (12,33%) di Kabupaten Lampung Barat; dan sisanya 3 desa IDT (0,42%) di Kotamadya Bandar Lampung.

Data jumlah keluarga pra sejahtera (katagori keluarga miskin) di Provinsi Lampung, menurut Drs. Maman Sudjana, Kepala BKKBN Lampung (Sinar Pagi, 5 Juli 1998) hingga Maret 1998 tercatat 442.199 kepala keluarga (KK) atau 31,54% dari 1,39 juta KK. Jumlah keluarga pra sejahtera tersebar di seluruh daerah tingkat II, dengan perincian di Kabupaten Tulang Bawang berjumlah 90.908 KK; Kabupaten Lampung Utara berjumlah 79.621 KK; Kabupaten Lampung Selatan

berjumlah 72.460 KK; Kabupaten Tanggamus berjumlah 53.457 KK; Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 125.906 KK; Kabupaten Lampung Barat Berjumlah 15.611 KK; dan Kotamadya Bandar Lampung berjumlah 4.236 KK.

Kabupaten Tanggamus dan Tulang Bawang merupakan Kabupaten baru sebelumnya merupakan wilayah Lampung Utara. Selain itu, pada tahun 1999, wilayah Kabupaten Lampung Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu kabupaten Dati II Lampung Utara dan Kabupaten Dati II Waykanna. Karena baru dimekarkan, maka data yang disajikan masih mengacu pada data kabupaten Lampung Utara sebelum dimekarkan.

B. Desa dan Keluarga Miskin di Kabupaten Lampung Utara

Jumlah desa IDT dan non IDT di daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara sampai bulan Juni 1998 berjumlah 208 desa IDT (53,33%) dan 182 desa non IDT (46,67%).

Desa IDT terbanyak di Kecamatan Pakuan Ratu berjumlah 39 desa IDT, disusul Kecamatan Baradatu berjumlah 26 desa IDT, dan Kecamatan Sungkai Selatan berjumlah 25 desa IDT. Selengkapnya jumlah desa IDT dan non IDT menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat pada Tabel III.1

Tabel III.1
Jumlah desa IDT dan non IDT Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Lampung Utara
Tahun 1998

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa IDT	Jumlah Desa Non IDT	Total
1.	Kec. Pakuan Ratu	39	2	41
2.	Kec. Baradaru	26	12	38
3.	Kec. Sungkai Selatan	25	17	42
4.	Kec. Blambangan Umpu	24	21	45
5.	Kec. Abung Barat	19	19	38
6.	Kec. Kasui	16	9	25
7.	Kec. Bahuga	12	10	22
8.	Kec. Sungkai Utara	12	12	24
9.	Kec. Tanjung Raja	9	8	17
10.	Kec. Banjit	9	11	20
11.	Kec. Bukit Kemuning	6	8	14
12.	Kec. Kotabumi	5	21	26
13.	Kec. Abung Selatan	4	13	17
14.	Kec. Abung Timur	2	19	21
Total		208	182	390

Sumber data: Diolah dari data Instruksi Bupati Kepala Daerah Tk. I Lampung Utara No. 193 Tahun 1998.

Sementara itu, jumlah keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) di Kabupaten Lampung Utara sampai bulan Juni 1998 adalah berjumlah 82.731 Pra Sejahtera (PS) dan 29.741 Keluarga Sejahtera I. Keluarga Pra Sejahtera (PS) terbanyak terdapat di Kecamatan Pakuan Ratu berjumlah 12.278 KK, disusul Kecamatan Blambangan Umpu berjumlah 10.231 KK dan Kecamatan Sungkai Selatan berjumlah 8.912 KK. Selengkapnya jumlah Keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) menurut kecamatan di Kabupaten Lampung Utara sampai Juni 1998 dapat dilihat pada Tabel III.2.

Tabel III.2
 Jumlah Keluarga Pra Sejarah (PS) dan
 Keluarga Sejahtera I (KS-I) Menurut Kecamatan
 Di Kabupaten Lampung Utara
 Tahun 1998

No	Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga Prasejarah (PS)	Jumlah Keluarga Sejahtera (KS-I)
1.	Kec. Pakuan Ratu	12.287	1.903
2.	Kec. Baradatu	5.218	1.118
3.	Kec. Sungkai Selatan	8.912	3.590
4.	Kec. Blambangan Umpu	10.231	4.296
5.	Kec. Abung Barat	3.185	2.032
6.	Kec. Kasui	4.405	3.224
7.	Kec. Bahuga	7.374	581
8.	Kec. Sungkai Utara	4.705	834
9.	Kec. Tanjung Raja	1.729	1.846
10.	Kec. Banjit	4.185	2.285
11.	Kec. Bukit Kemuning	2.173	568
12.	Kec. Kotabumi	6.507	3.674
13.	Kec. Abung Selatan	6.487	1.708
14.	Kec. Abung Timur	5.333	2.082
Total		82.731	29.741

Sumber data : Diolah dari data Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara No. 193 Tahun 1998.

Keterangan : Jumlah Keluarga Prasejahtera (PS) dan Keluarga Sjahtera (KS-I) dihitung baik dari desa IDT maupun desa non IDT.

C. Profil Kecamatan Tanjung Raja dan Pelaksanaan Program IDT

Kecamatan Tanjung Raja merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Kemuning yang waktu itu masih dalam lingkup

kenegerian Semendo Abung dengan kepala Negeri Semendo Abung Hi.A.Azis Kontar. Wilayah Tanjung Raja ditetapkan menjadi kecamatan pada tanggal 24 november 1971 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung Nomor 342/UP/1971. Dalam keputusan tersebut ditetapkan desa Tanjung Raja sebagai Ibukota Kecamatan Tanjung Raja dengan Camat pertama M.Saleh Sakri, BA.

Pengembangan wilayah Kecamatan Tanjung Raja berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Tanjung Raja yang ditetapkan pemerintah kabupaten daerah Tingkat II Lampung Utara tahun 1994/1995, dibagi menjadi 4 bidang, yaitu: kependudukan; ekonomi; pelayanan sosial; dan penggunaan lahan.

Dalam bidang kependudukan, kebijakan yang ditempuh adalah memperkecil tingkat pertambahan penduduk dengan menurunkan angka kelahiran melalui program KB. Meratakan penyebaran penduduk untuk menciptakan lingkungan yang serasi serta menciptakan keseimbangan dalam proses pembangunan perkotaan. Kebijakan ini diwujudkan dengan melakukan penyebaran fasilitas-fasilitas pelayanan umum kota keseluruh daerah pemukiman penduduk. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja, terutama untuk mengurangi tingkat pengangguran serta untuk mencapai pemerataan tingkat pendapatan dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Untuk mewujudkan kebijakan ini, usaha yang dilakukan adalah menumbuhkan sektor industri yang bersifat padat karya.

Dalam bidang pelayanan sosial, kebijakan yang ditempuh adalah pengembangan di bidang pendidikan terutama diarahkan kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan keserasian pendidikan dan kebutuhan pembangunan, mutu pendidikan dan kesempatan kerja. Pembangunan pendidikan diprioritaskan pada pendidikan dasar. Dibidang kesehatan, pembangunan ditujukan untuk mengurangi atau menekan timbulnya wabah penyakit dan pembinaan keluarga berencana. Pembangunan fasilitas-fasilitas sosial lainnya yang diharapkan dapat mencukupi dengan jumlah penduduk yang dilayaninya.

Dalam bidang ekonomi, kebijakan pembangunan ditujukan untuk menunjang usaha peningkatan perluasan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk. Untuk itu, pembangunan di sektor perdagangan ditujukan untuk mendorong peningkatan produksi barang dan jasa serta menyempurnakan arus barang dan jasa agar dapat meningkatkan pendapatan produsen sekaligus menjamin kepentingan konsumen.

Fungsi Kota Tanjung Raja adalah sebagai pusat pemerintahan kecamatan yang memberikan pelayanan dan penganyoman masyarakat. Sebagai pusat pemasaran bagi komoditas pertanian yang dihasilkan oleh desa-desa di sekitarnya dan sebagai pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa. Fungsi lainnya, sebagai kota transisi antara kota dengan desa sebagai katalisator nilai-nilai sosial desa yang pada gilirannya menjadi wahana proses akulturasi nilai sosial bangsa, serta berfungsi sebagai pusat pendidikan dasar dan menengah.

Peranan Kota Tanjung Raja merupakan pusat penggerak pertumbuhan dan kota pendukung bagi daerah-daerah di sekitarnya.

Wilayah Kecamatan Tanjung Raja terdiri dari 17 desa difinitif, 3 diantaranya dengan klasifikasi desa swasembada, 10 desa swakarya dan 4 desa swadaya. Luas wilayah Kecamatan Tanjung Raja adalah 33.170 hektar. Desa yang paling luas wilayahnya adalah desa Sinar Jaya yaitu 5.543 hektar, disusul desa Gunung Katon dengan luas wilayah 4.294 hektar dan desa Tulang Balak dengan luas wilayah 3.543 hektar. Selengkapanya mengenai desa berdasarkan klasifikasi dan luas wilayah di Kecamatan Tanjung Raja dapat dilihat pada Tabel III.3

Tabel III.3
 Nama Desa, Klasifikasi Desa dan Luas Wilayah
 Di Kecamatan Tanjung Raja

No.	Nama-Nama Desa	Klasifikasi Desa	Luas Wilayah (Hektar)
1	Sinar Jaya	Swakarya	5.543
2	Gunung Katon	Swadaya	4.294
3	Tulung Balak	Swakarya	3.543
4	Merambung	Swakarya	3.300
5	Tanjung Raja	Swasembada	3.081
6	Ulakata	Swakarya	1.840
7	Srimenanti	Swasembada	1.698
8	Tanjung Beringin	Swadaya	1.600
9	Sukasari	Swakarya	1.500
10	Sindang Agung	Swasembada	1.156
11	Suka Mulya	Swadaya	1.100
12	Tanjung Riang	Swakarya	935
13	Sindang Marga	Swakarya	925
14	Mekar Jaya	Swakarya	895
15	Karang Waringin	Swakarya	800
16	Sido Mulyo	Swadaya	635
17	Kemala Raja	Swakarya	525
		Total	33.170

Sumber Data: BPS Lampung Utara, Kecamatan Tanjung Raja Dalam Angka Tahun 1997

Secara administratif wilayah Kecamatan Tanjung Raja berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Lampung Barat
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Lampung Tengah
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Buit Kemuning
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Abung Barat

Keadaan Geogarfi dan Jarak

Kecamatan Tanjung Raja terletak diantara sudut 30° – 95° sampai dengan 3° - 71° Lintang Utara dan 104° – 41° Bujur Timur.

Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian rata-rata 400-500 M dari permukaan laut.

Jarak Ibukota Kecamatan Tanjung Raja dengan Kotabumi (Ibukota Kabupaten Lampung Utara) sejauh 42 Km. Dan dengan Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung) berjarak 135 Km. Desa terjauh adalah Suka Mulya dengan jarak 20 Km, dan desa terdekat adalah desa Tulung Balak dengan jarak 1 Km.

Tata Guna Tanah (*Land Use Planing*)

Keadaan tata guna tanah Kecamatan Tanjung Raja adalah terdiri dari:

1. Perkebunan Rakyat	: 13.579 Hektar
2. Hutan	: 12.800 Hektar
3. Peladangan	: 4.055 Hektar
4. Pekarangan	: 1.391 Hektar
5. Sawah	: 578 Hektar
6. Kolam	: 85 Hektar
7. Lain-lain	: 682 Hektar
	+ -----
Total	: 33.170 Hektar

(Sumber Data: BPS Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Tanjung Raja Dalam Angka Tahun 1997)

Irigasi (Pengairan)

Di Kecamatan Tanjung Raja belum terdapat sistem pengairan (irigasi) teknis. Dalam mengelola tanah persawahan di Kecamatan Tanjung Raja terdapat irigasi setengah teknis seluas 183 hektar; irigasi sederhana seluas 149 hektar, dan sisanya 236 hektar lainnya

(secara alami). Irigasi setengah teknis hanya terdapat di 3 desa, yaitu: desa Mekar Jaya seluas 75 hektar; desa Sindang Agung seluas 68 hektar; dan desa Sinar Jaya seluas 40 hektar. Sedang pengairan

sederhana terdapat di 5 desa, yaitu: desa Sindang Agung seluas 85 hektar; desa Srimenanti 20 hektar; desa Sinar Jaya 20 hektar; desa Merambung 14 hektar; dan desa Mekar Jaya 10 hektar.

Suku Bangsa dan Kependudukan

Keadaan suku bangsa penduduk di Kecamatan Tanjung Raja cukup bervariasi, secara prosentase adalah terdiri dari 45% suku Jawa, Sunda dan Madura; 30% suku Semendo, Ogam (suku asli Sumatera Selatan); 10% suku asli Lampung; dan sisanya 15% suku lainnya (**Sumber Data:** Kecamatan Tanjung Raja Dalam Angka 1997, BPS Kabupaten Lampung Utara).

Jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Raja sampai akhir tahun 1997 berjumlah 28.274 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 5.913 KK.

Keadaan penduduk menurut jenis kelamin terdiri dari 14.424 orang laki-laki dan 13.950 perempuan. Penduduk laki-laki dewasa berjumlah 7.816 jiwa dan anak-anak 6.608 jiwa. Sedang perempuan dewasa berjumlah 7.467 jiwa dan anak-anak 6.483 jiwa. Selain itu, terdapat 11 jiwa warga negara asing berasal dari Cina.

Dalam tahun 1997 jumlah penduduk yang lahir 281 jiwa dan meninggal 48 jiwa. Sedang jumlah penduduk yang datang berjumlah 436 jiwa dan yang pindah berjumlah 198 jiwa. Menurut informasi jumlah penduduk yang datang semakin meningkat jumlahnya selama masa krisis moneter, terutama penduduk setempat yang selama ini bekerja di sekitar wilayah JABOTABEK.

Keadaan Pasangan Usia Subur (PUS) di kecamatan Tanjung Raja dalam tahun 1997 berjumlah 5.562 PUS. Diantaranya 3.990 PUS menjadi akseptor KB. Dari 3.990 akseptor KB, jenis alat kontrasepsi KB yang digunakan terdiri dari: 1.826 Suntikan; 952 Pil; 888 Inplan; 298 IUD; 17 MOW; 5 Kondom; dan 4 MOP.

Keadaan penduduk menurut agama di Kecamatan Tanjung Raja adalah 28.351 orang beragama Islam; 8 orang beragama Katolik; 7 orang beragama Hindu; 4 orang beragama Kristen Protestan; dan 4 orang beragama Budha.

Jumlah rumah tangga/kepala keluarga dan penduduk per desa di Kecamatan Tanjung Raja hingga akhir tahun 1997 dapat dilihat pada Tabel III. 4

Tabel III. 4
Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Per Desa
Di Kecamatan Tanjung Raja
Tahun 1997

No. Urut	Nama Desa	Jumlah Rumah Tangga/KK	Jumlah Jiwa
1	Tanjung Raja	712	3.818
2	Srimenanti	489	3.171
3	Sindang Agung	526	2.524
4	Merambung	487	2.482
5	Tanjung Beringin	419	1.987
6	Kemala Jaya	402	1.787
7	Sukasari	449	1.707
8	Sinar Jaya	297	1.457
9	Ulak Balak	310	1.456
10	Mekar Jaya	396	1.366
11	Karang Waringin	271	1.189
12	Tulang Balak	239	1.105
13	Gunung Katon	229	957
14	Suka Mulya	214	928
15	Tanjung Riang	146	907
16	Sido Mulyo	191	828
17	Sindang Marga	136	705
	Total	5.912	28.374

Sumber Data: BPS Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Tanjung Raja Dalam Angka 1997

Mata Pencarian Penduduk

Umumnya mata pencaharian utama penduduk di Kecamatan Tanjung Raja adalah pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan kopi, lada, cengkeh dan padi sawah/ladang. Keadaan penduduk menurut mata pencarian di Kecamatan Tanjung Raja dapat dilihat pada Tabel III.5

Tabel III.5
Penduduk Menurut Mata Pencarian Utama
Di Kecamatan Tanjung Raja
Tahun 1997

No.	Jenis Mata Pencaharian Utama	Jumlah Jiwa
1	Pertanian/Perkebunan	8.866
2	Jasa	255
3	Perdagangan	52
4	Angkutan	21
5	Pegawai Negeri	21
6	Industri/Pengolahan	12
7	Pertambangan	12
8	Lain-lain	526
	Total	9.765

Sumber Data: BPS Kabupaten Lampung Utara,
Kecamatan Tanjung Raja Dalam
Angka Tahun 1997

Luas tanaman padi dan palawijaya di Kecamatan Tanjung Raja pada tahun 1997 adalah terdiri dari:

- Padi	: 1.656 hektar
- Jagung	: 145 hektar
- Ubi kayu	: 123 hektar
- Kacang tanah	: 12 hektar
- Kedelai	: 2 hektar
	-----(+)
Total	: 1.938 hektar

Luas tanaman perkebunan di Kecamatan Tanjung Raja dalam tahun 1997 terdiri dari:

- Kopi	: 5.351 hektar
- Lada	: 2.162 hektar
- Cengkeh	: 1.240 hektar
- Kelapa	: 19 hektar
- Karet	: 10 hektar
	-----(+)
Total	: 8.782 hektar

Produksi tanaman perkebunan pada tahun 1997 adalah:

- Kopi	: 1.533 ton
- Lada	: 312 ton
- Cengkeh	: 80 ton
- Kelapa	: 13 ton
- Karet	: 5 ton
	-----(+)
Total	: 1.943 ton

Di samping padi, palawija dan tanaman perkebunan kopi, lada, cengkeh, kelapa dan karet. Penduduk Kecamatan Tanjung Raja menanam jenis tanaman buah-buahan seperti pisang, mangga, rambutan, durian, duku dan lain-lainnya. Jenis tanaman tersebut umumnya ditanam secara campuran dan belum merupakan tanaman perkebunan yang khusus. Pisang merupakan produksi terbesar. Pada tahun 1997 produksi pisang berjumlah 3.389.807 tandan.

Sarana dan Prasarana

Keadaan sarana perekonomian sangat minim dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Di Kecamatan Tanjung Raja hanya terdapat 1 pasar dan 1 KUD yang letaknya di Ibukota Kecamatan. Di wilayah ini belum terdapat bank yang sebenarnya sangat diperlukan dalam menunjang lalu lintas perekonomian/

perdagangan. Sarana ekonomi lainnya, adalah warung-warung kecil milik pedagang yang terbesar di wilayah pedesaan.

Dalam bidang pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Tanjung Raja sudah cukup memadai. Pada tahun 1997 terdapat 1 TK swasta dengan jumlah murid 53 orang dan guru 2 orang; 32 SD Negeri dengan jumlah murid 4.772 orang dan guru 159 orang; 5 SD/MI swasta dengan jumlah murid 251 orang dan guru 48 orang; 3 SMP Negeri dengan jumlah murid 898 orang dan guru 43 orang; 1 SMP/MTS swasta dengan jumlah murid 143 orang dan guru 16 orang; dan 1 SMA swasta dengan jumlah murid 62 orang dan guru 19 orang.

Di bidang kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan masih perlu ditingkatkan, terutama tenaga medis. Di Kecamatan Tanjung Raja terdapat 4 puskesmas/puskesmas pembantu; 15 klinik bersalin; 1 dokter praktek. Sedang jumlah tenaga kesehatan terdiri dari 1 orang dokter; 12 mantri/perawat; 14 bidan; 35 dukun bayi; dan 6 dukun patah tulang.

Sarana dan prasarana di bidang keagamaan terdapat 63 mesjid dan 38 surau/langgar.

Sementara itu keadaan perumahan penduduk terdiri dari 961 buah rumah permanen,; 2.602 buah semi permanen; dan 2.350 buah sederhana.

Pelaksanaan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT)

Mengenai Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Kecamatan Tanjung Raja sudah melaksanakan program IDT sejak tahun 1994/1995. Dan sekarang sudah memasuki tahun ketiga bantuan IDT. Dari 17 desa di wilayah Kecamatan Tanjung Raja, terdapat 9 desa IDT dan 8 desa non IDT.

Dari 9 desa IDT terdapat 958 KK Pra Sejahtera (PS) dan 606 KK Sejahtera I (KS-I). Sedangkan dari 8 desa non IDT terdapat 771

KK Pra Sejahtera (PS) dan 1.240 KK Sejahtera I (KS-I). Rincian jumlah keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) desa IDT dan desa non IDT di Kecamatan Tanjung Raja dapat dilihat pada Tabel III.6

Tabel III.6
 Keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I)
 Desa IDT dan non IDT di Kecamatan Tanjung Raja
 Tahun 1998

Nama Desa IDT	Jumlah PS	Jumlah KS-I	Nama Desa Non IDT	Jumlah PS	Jumlah KS-I
Tanjung Beringin	281	42	Tanjung Raja	219	234
Sinar Jaya	144	110	Kemala Jaya	177	89
Karang Waringin	111	29	Sri Menanti	170	85
Tulung Balak	105	74	Sindang Agung	61	98
Ula Uta	99	125	Suka Sari	56	375
Suka Mulya	81	38	Mekar Jaya	47	175
Sidomulyo	68	69	Merambung	34	119
Tanjung Riang	55	93	Sindang Marga	7	65
Gunung Katun	14	26			
Total	958	606	Total	771	1.240

Sumber Data: Diolah dari data Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara No.193 tahun 1998

Pelaksanaan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) Di Kecamatan Tanjung Raja, menurut informasi masyarakat umumnya banyak mengalami kegagalan. Faktor penyebab kegagalan tersebut antara lain:

- (1) Bentuk kegiatan bantuan yang diberikan bersifat *top-down* atau ditentukan dari atas, dan banyak yang tidak sesuai/cocok dengan keinginan maupun kemampuan masyarakat setempat;
- (2) Bantuan berupa uang pengelolaannya tidak terbuka. Jika berbentuk ternak, misalnya kambing dalam keadaan sakit atau bukan bibit unggul.
- (3) Tenaga pendamping tidak disiplin atau jarang di tempat, bahkan terdapat pendamping setelah satu atau dua bulan

kemudian tidak muncul lagi. Juga tenaga pendamping yang ditempatkan tidak punya keahlian yang sesuai dengan kebutuhan desa setempat.

- (4) Tidak adanya monitoring atau pengawasan dari instansi terkait setelah proyek bantuan ini diberikan.
- (5) Jumlah bantuan yang diberikan untuk setiap keluarga jumlahnya relatif kecil.
- (6) Tidak ada usaha instansi terkait memperbaiki atau memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, akan tetapi bantuan terus diberikan.
- (7) Lokasi desa yang terisolir, sarana dan prasarana desa yang terbatas.
- (8) Kurangnya persiapan awal sebelum program tersebut diberikan, dan kurangnya penyuluhan dan pembinaan dari instansi kepada masyarakat penerima bantuan.
- (9) Kurangnya pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat (tokoh adat/agama).
- (10) Sulitnya merubah pola pikir masyarakat setempat, terutama masyarakat asli Lampung yang merasa daerah sendiri dan banyak menunggu, sehingga kalah bersaing dengan pendatang. Selain itu, kebiasaan penduduk disini ketika memperoleh hasil panen, mereka cenderung konsumtif dan belum terbiasa menabung. Setelah hasil panen habis, kebiasaan mereka meminjam uang atau barang dengan sistem ijon. Juga masyarakat disini masih cukup tinggi mempercayai terhadap hal-hal yang bersifat gaib (mistik).

D. Desa Sinar Jaya “Potret Desa Miskin di Kawasan Hutan”

Studi mikro dilakukan di desa Sinar Jaya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara. Pemilihan desa ini disesuaikan dengan usulan yang mengedepankan desa miskin yang berdekatan dengan kawasan hutan. Berdasarkan hal tersebut, maka alasan dipilihnya Desa Sinar Jaya adalah sebagai berikut:

Pertama, Desa Sinar Jaya merupakan desa yang mempunyai wilayah paling luas di kecamatan Tanjung Raja. Letak pemukiman penduduk Desa Sinar Jaya berada sekitar antara 1-2 Km dari kawasan hutan lindung. Wilayah Desa Sinar Jaya merupakan areal hutan lindung terluas kedua (3.200 hektar) di Kecamatan Tanjung Raja, terluas pertama desa Gunung Katon (3.250 hektar).

Kedua, Desa Sinar Jaya merupakan desa yang semula agak terisolir, keadaan sarana jalan yang menghubungkan ke desa tersebut tidak baik. Kondisi ini menyebabkan sebelumnya tidak ada warga masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat (sekarang sudah ada 4 warga masyarakat memiliki kendaraan roda empat). Kendaraan umum tidak secara rutin setiap hari melewati desa ini hingga sekarang. Karenanya, untuk mencapai desa ini dari ibukota kecamatan Tanjung Raja, umumnya masyarakat menggunakan ojek atau dengan mencarter kendaraan umum. Namun dibandingkan dengan desa lain di kawasan hutan lindung dalam wilayah kecamatan Tanjung Raja, desa ini merupakan salah satu desa di kawasan hutan lindung yang dapat dilalui kendaraan roda empat.

Ketiga, Desa Sinar Jaya adalah desa IDT dengan jumlah keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) urutan kedua terbesar di kecamatan Tanjung Raja dan urutan pertama untuk desa di kawasan hutan di kecamatan Tanjung Raja. Terdapat sekitar 104 kepala Keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera (KS-I) belum menerima bantuan apapun.

Keempat, kondisi Keluarga Prasejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) umumnya lantai rumah mereka dari tanah, dinding terbuat dari gedek. Tidak memiliki lahan pertanian atau memiliki lahan yang sempit. Tingkat pendidikan rendah. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih terbatas, apalagi terjadi kemarau panjang. Begitu pula kemampuan membeli pakaian terbatas, dan jika menderita sakit masih banyak yang berobat ke dukun.

Kelima, secara budaya terutama penduduk asli mempunyai sikap menunggu dan jika mendapat hasil panen umumnya mereka cenderung konsumtif.

Keenam, Desa Sinar Jaya sering dilanda bencana paceklik, terutama musim kemarau yang umumnya terjadi pada bulan Januari-Februari. Selain itu, desa ini pada bulan juni 1998 terjadi bencana serangan belalang secara besar-besaran dan memusnahkan cocok tanam pertanian dan perkebunan penduduk.

Ketujuh, terbatasnya lahan pertanian/perkebunan yang dimiliki penduduk, menyebabkan penduduk seringkali memanfaatkan (menjarah) lahan di areal kawasan hutan lindung. Penebangan secara liar di areal kawasan hutan lindung merupakan jalan pintas bagi penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ini dapat menimbulkan bahaya kerusakan lingkungan di kawasan hutan lindung.

Kedelapan, Desa Sinar Jaya memiliki kekayaan alam yang cukup subur, terutama untuk pertanian/perkebunan, seperti kopi, lada, cengkeh, ubi kayu, pisang, padi dan palawija. Namun karena terbatasnya permodalan, sarana dan prasarana, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki penduduk setempat, juga di masa lalu terjadinya isolasi perhatian dari pemerintah, terutama kurangnya pembinaan dari petugas lapangan dalam bidang peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan.

Kesembilan, Desa Sinar Jaya telah menerima berbagai bantuan pemerintah dalam rangka program pengentasan kemiskinan, seperti IDT; Takesra/Kukesra; PDM-DKE; P3DT; JPS-OPK; JPS Kesehatan; Program Aksi PMB –LIPI dan lain-lainnya. Berbagai program bantuan yang diberikan pemerintah, umumnya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, bahkan diantaranya banyak yang gagal.

Untuk mengetahui keadaan desa Sinar Jaya, paparan berikut ini dikemukakan profil desa Sinar Jaya, potret desa miskin di kawasan

hutan lindung dalam wilayah bukit barisan. Desa Sinar Jaya termasuk dalam klasifikasi desa swakarya dan merupakan desa dengan jumlah kepala Keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) terbanyak kedua di Kecamatan Tanjung Raja.

Luas wilayah desa adalah 5.543 hektar, diantaranya 3.200 hektar adalah areal wilayah kawasan hutan lindung. Jarak desa dengan ibukota Kecamatan Tanjung Raja adalah 5 Km, Kotabumi (Ibukota Kabupaten Lampung Utara) berjarak 47 Km dan Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung) berjarak 142 Km. Untuk mencapai desa Sinar Jaya khususnya dari Ibukota Kecamatan menuju desa Sinar Jaya dengan sarana angkutan ojek atau dengan mencarter kendaraan roda empat. Karena kendaraan umum roda empat tidak rutin setiap hari melalui desa ini. Keterbatasan sarana angkutan umum kendaraan roda empat, menyebabkan terbatasnya kegiatan penduduk untuk berpergian ke Ibukota Kecamatan maupun ke Kotabumi Ibukota Kabupaten Lampung Utara.

Keadaan jalan dari Ibukota Kecamatan ke desa Sinar Jaya berupa jalan yang telah diperkeras dengan batu yang belum begitu baik. Sedangkan keadaan jalan dipemukiman antara dusun satu dengan yang lain, berupa jalan tanah yang jika turun hujan sulit untuk dilalui. Jalan yang menghubungkan antara dusun satu dengan dusun yang lain pada saat penelitian ini sedang dalam tahap pembangunan proyek P3DT.

Secara administratif, desa Sinar Jaya berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Merambung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung Bukit Barisan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Way Sabuk Kiri
- Sebelah Timur berbatasan dengan Way Sembung

Sejarah Pemukiman dan Struktur Demografi

Tidak diketahui sejak kapan penduduk pribumi Lampung mulai mendiami atau membangun pemukiman di Desa/Perkampungan Sinar Jaya, yang jelas menurut beberapa informan penduduk yang bermukim pertama di daerah ini adalah pribumi Lampung. Mereka pertama kali datang ke daerah ini adalah sebagai peladang berpindah-pindah, kemudian mereka mendirikan pondok atau huma di sekitar wilayah ladang mereka. Dan sudah menjadi kebiasaan penduduk di daerah ini, setelah ladang padi ditanami atau setelah usai panen, biasanya areal tersebut ditanami kopi, kelapa, cengkeh, lada dan jenis tanaman lainnya atau dibiarkan menjadi hutan belukar yang tetap dianggap sebagai merekalah pemilik dari lahan tersebut.

Sejalan dengan perkembangan waktu, penduduk pribumi Lampung yang mendiami daerah inipun semakin banyak. Kemudian merekapun mendirikan pemukiman atau perkampungan penduduk yang letaknya dulu berada di Dusun I Desa Sinar Jaya sekarang. Perkampungan penduduk dusun I ini dulu termasuk dalam wilayah desa Merambung, dan sekitar tahun 1980-an statusnya berubah menjadi sebuah desa yang berdiri sendiri.

Perkembangan berikutnya, hadirnya penduduk pendatang Suku Samendo dan Suku Ogam asal Sumatera Selatan yang melakukan ladang berpindah-pindah dan membuat pemukiman di daerah ini. Kehadiran orang Samendo dan Ogam yang cukup “agresif” atau “berani dan ganas” (menurut istilah pribumi Lampung), menyebabkan secara perlahan-lahan penduduk pribumi Lampung mulai tersingkir atau menyingskir ke daerah lain.

Selanjutnya, menurut informan sekitar tahun 1928, ketika bangsa Indonesia masih dibawah jajahan kolonial belanda, mulai hadirnya penduduk pendatang orang Sunda dan Jawa. Arus perpindahan itu didasarkan pada inisiatif mereka sendiri, bukan melalui program transmigrasi. Konon dulunya mereka datang ke daerah ini sebagai buruh atau pekerja upahan di perkebunan kopi,

lada dan cengkeh milik orang Samendo, Ogam dan pribumi Lampung. Karena orang Sunda dan Jawa ini merupakan pekerja yang tekun dan ulet, maka dari hasil upahan tersebut mereka tabung dan lambat laun merekapun mulai membeli tanah milik orang Samendo, Ogam dan pribumi Lampung.

Selain itu, diantara pemilik kebun terdapat pula yang memberikan lahan kepada buruh atau pekerja upahan pendatang dari pulau Jawa (orang Sunda dan Jawa) tersebut, yang biasanya terletak tidak berjauhan dari kebun miliknya. Jadi sambil bekerja di kebun milik majikannya, si buruh/pekerja juga dapat mengerjakan kebun di areal lahan yang diberikan oleh majikannya. Hal ini dimaksudkan agar si buruh/pekerja dapat menjadi betah bekerja di tempat majikannya. Apalagi waktu itu tanah masih tersedia cukup luas dan harganya tidak begitu bernilai (sangat murah). Kebiasaan seperti itu, dahulu merupakan hal yang umum terjadi di wilayah Sumatera Selatan pada umumnya dan Lampung pada khususnya. Kenyataan ini membawa pengaruh yang besar terhadap pendatang khususnya orang Sunda dari Banten, Pandeglang, Tasikmalaya, Kuningan dan Daerah Jawa Barat lainnya di Desa Sinar Jaya.

Arus migrasi orang Sunda terus berlanjut hingga sekarang, terutama dengan adanya interaksi melalui kekerabatan keluarga antara mereka yang tinggal di kampung halaman (Jawa Barat) dengan mereka yang tinggal di Desa Sinar Jaya. Makin meningkatnya jumlah penduduk pendatang asal Jawa Barat dari tahun ke tahun, menyebabkan semakin terdesaknya penduduk pribumi Lampung, Orang Samendo dan Orang Ogam, baik jumlah maupun dalam hal pemilikan lahan. Saat ini secara suku bangsa menurut tokoh masyarakat setempat diperkirakan sekitar 80% penduduk desa Sinar Jaya adalah orang Sunda, disusul kemudian sekitar 10% suku Samendo/Ogam, kemudian pribumi Lampung dan Jawa masing-masing sekitar 5%.

Menurut H. Abdurra'i, mantan Kepala Desa Sinar Jaya selama 16 tahun, sekarang masih dianggap oleh masyarakat setempat

sebagai tokoh masyarakat yang berpengaruh, menyatakan bahwa Desa Sinar Jaya menjadi desa difinitif pada tanggal 31 Desember 1974. Waktu itu jumlah kepala keluarga masih berjumlah 89 KK. Sebelumnya wilayah ini merupakan kampung (istilah sekarang “Dusun”) yang merupakan bagian dari Desa Marambung. Pada saat itu selama ia menjadi kepala desa, penduduk desa Sinar Jaya begitu besar rasa kebersamaan dan kegotong-royongan dalam membangun sarana jalan, tempat peribadatan, gedung SD dan gedung Madrasah. Dalam waktu 3 tahun sarana dan prasarana dapat diwujudkan. Sehingga desa ini, yang semula terisolir menjadi terbuka.

Partisipasi masyarakat dalam membangun desa waktu itu begitu besar. Menurut H. Abdurra'i, faktor keberhasilan ini adalah karena kepala desa dan pamong desa lainnya bertanggung jawab, sehingga masyarakat sangat mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala desa. Disamping itu, dalam membangun desa, ia selalu menerapkan ajaran agama Islam, dan baginya sebagai kepala desa tidak takut rugi. Karenanya, ia selalu membantu anggota masyarakat yang mendapat kesusahan, bagi saya membantu masyarakat merupakan rasa syukur saya kepada Allah SWT.

Lebih lanjut, ia mengemukakan, pada waktu membangun madrasah misalnya, dia membantu sebesar Rp.2.750.000,- dan waktu itu cukup besar, karena biaya naik haji pada waktu itu hanya Rp.1.300.000,-. Begitu pula ketika mengerjakan jalan, disediakan makanan, rokok dan berbagai keperluan lainnya. Dengan cara begitu, masyarakat lainpun memberi bantuan secara gotong royong dalam membangun desa. Gotong royong masyarakat mulai berkurang setelah pemerintahan mengeluarkan kebijaksanaan dana bantuan pembangunan desa (Bangdes). Dewasa ini nilai-nilai kegotong-royongan makin menipis dan masyarakat makin sulit untuk berpartisipasi dalam membangun desa, semuanya serba pulus (UUD=Ujung-Ujungnya Duit).

Ketika ia menjadi kepala desa tidak ada masyarakat yang tidak membayar pajak (PBB) dan masyarakat sangat takut dengan

kepala desa. Dahulu di desa ini banyak ijon dan sistem ijon ini sudah lama dan turun temurun, siapa yang memulainya tidak diketahui dengan pasti. Ketika ia menjadi kepala desa, secara perlahan-lahan ijon dapat dihilangkan. Karena ia secara tegas melarang cara demikian.

Penduduk yang mendiami daerah ini waktu itu adalah orang Lampung asli dan orang Samendo. Penduduk pendatang mulai datang ke desa ini (dulu disebut Kampung Sinar Jaya) sekitar tahun 1974, yakni penduduk pendatang dari Tasikmalaya dan seterusnya diikuti penduduk pendatang lainnya seperti dari Kuningan, Jawa Tengah dan lain-lainnya.

Dahulu penduduk pendatang bekerja sebagai kuli (buruh) di kebun lada (sahang) milik penduduk asli Lampung. Waktu itu (th.1951) lada begitu berharga sekali, dan daerah Tanjung Raja merupakan penghasil lada yang cukup besar. Mereka datang ke daerah ini secara sendiri-sendiri. Umumnya mereka datang ke daerah ini, karena ditempat asal mereka keadaan hidupnya susah. Karena itu kedatangan mereka oleh penduduk asli perlu ditolong. Banyak penduduk asli yang memiliki lahan perkebunan menganjurkan penduduk pendatang agar membeli tanahnya dari hasil upah menjadi kuli, ada juga oleh majikannya dibikin kebun disekitar kebun miliknya. Selain itu, ada juga dengan cara bagi hasil. Cara bagi hasil sudah sejak lama dikenal penduduk di desa ini.

Dewasa ini penduduk asli Lampung dan orang Samendo tinggal sedikit dan merupakan generasi kedua. Jumlah penduduk asli dan orang Samendo sekitar 25 KK. Selebihnya sebagian besar orang Sunda dan sebagian kecil pendatang lainnya, seperti orang Jawa sekitar 10 KK, Bugis 1 KK, Ogam 1 KK. Tanah disini dahulu milik orang asli Lampung yang waktu itu masih bergabung dengan desa Merambung.

Potensi Desa dan Permasalahannya

Keadaan alamnya cukup subur, berada di daerah perbukitan dengan ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Suhu di sekitar desa Sinar Jaya relatif cukup dingin, dengan curah hujan rata-rata 3.525 mm pertahun. Dengan kondisi tanah, ketinggian, suhu dan curah hujan seperti itu, jenis tanaman yang cocok untuk pertanian adalah tanaman keras, seperti kopi, lada, cengkeh, kelapa dan jenis tanaman lainnya. Selain itu, karena sepanjang tahun hampir ditemukan musim hujan, aliran sungai relatif mengalir sepanjang tahun, diantara penduduk juga mengelola sawah, ladang dan perikanan.

Keadaan alam yang relatif cukup subur ini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama rendahnya tingkat pendidikan mereka serta terbatasnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam mengelola bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan lain-lainnya. Hal ini menyebabkan tingkat pendapatan mereka masih rendah dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sangat terbatas (diantaranya terdapat penduduk yang makan sekali sehari, membeli pakaian sekali dalam setahun, tidak dapat menyekolahkan anaknya sampai tamat SD, tidak dapat mengobati keluarga yang sakit ke Puskesmas, lantai rumah dari tanah, dinding dari gedek dan kurang aktif dalam menjalankan ibadah agama yang dipeluknya).

Selain itu, diantara warga masyarakat banyak yang tidak memiliki lahan pertanian atau memiliki lahan yang sempit atau jika memiliki lahan yang luas tetapi tidak mampu menggarapnya karena terbatasnya permodalan.

Terbatasnya lahan pertanian/perkebunan yang dimiliki warga masyarakat, menyebabkan seringkali mereka memanfaatkan lahan (menjarah kayu) di kawasan hutan lindung dan ini akan menimbulkan bahaya kerusakan lingkungan di kawasan hutan lindung.

Keadaan peruntukkan tanah (tata guna tanah) pada tahun 1997 adalah terdiri dari:

Hutan Lindung	: 3.200 hektar
Perkebunan Rakyat	: 1.482 hektar
Perladangan	: 582 hektar
Sawah	: 67 hektar
Pemukiman/perumahan/pekarangan	: 121 hektar
Empang/kolam	: 12 hektar
Lainnya (makam,tanah wakaf dll)	: 113 hektar
	+
Total	: 5.543 hektar

Luas wilayah Desa Sinar Jaya tersebut mencakup dalam 3 dusun dengan 9 RT (Rukun Tetangga). Perkembangan jumlah penduduk dan rumah tangga/kepala keluarga di desa Sinar Jaya hanya diperoleh data tahun 1995 dan tahun 1997. Pada tahun 1995 penduduk desa Sinar Jaya berjumlah 1.347 jiwa, terdiri dari 675 jiwa laki-laki dan 772 jiwa perempuan. Jumlah rumah tangga/kepala keluarga sebanyak 275 KK. Pada akhir tahun 1997 atau dua tahun kemudian jumlah penduduk desa Sinar Jaya meningkat menjadi 1.475 jiwa atau meningkat sebanyak 110 jiwa (8,17%), terdiri dari 741 jiwa laki-laki dan 716 jiwa perempuan. Jumlah rumah tangga/kepala keluarga sebanyak 297 rumah tangga/kepala keluarga.

Dari 297 rumah tangga/kepala keluarga, diantaranya terdapat 144 Keluarga Pra Sejahtera (PS), 110 Keluarga Sejahtera I (KS-I), dan sisanya 43 Keluarga Sejahtera II (KS-II). Komposisi antara penduduk dewasa dan anak-anak pada akhir tahun 1997 adalah terdiri dari 719 jiwa penduduk dewasa (laki-laki 408 jiwa dan perempuan 341 jiwa), sedang sisanya 708 jiwa anak-anak (laki-laki 333 jiwa dan perempuan 375 jiwa).

Dalam tahun 1997 jumlah penduduk yang lahir adalah 19 jiwa dan jumlah penduduk yang datang selama tahun 1997 berjumlah 24 jiwa, sedang jumlah penduduk yang mati 3 jiwa dan pindah 18 jiwa. Ini berarti sepanjang tahun 1997 terjadi penambahan penduduk

berjumlah 22 orang. Jika dibandingkan tahun 1995 terjadi peningkatan, karena sepanjang tahun 1995 jumlah penduduk yang lahir berjumlah 27 jiwa dan jumlah penduduk yang datang nihil. Sedang jumlah penduduk yang mati berjumlah 8 orang dan pindah 13 orang. Ini berarti sepanjang tahun 1995 penambahan penduduk hanya berjumlah 6 jiwa.

Keadaan Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun 1997 berjumlah 264 PUS, diantaranya 168 PUS (63,64%) menjadi akseptor KB. Jenis alat KB yang digunakan terdiri dari: 61 PUS suntikan; 49 PUS pil; 44 PUS inplan; dan 14 PUS IUD.

Keadaan penduduk menurut agama, seluruhnya beragama islam. Sedang komposisi penduduk menurut pendidikan pada tahun 1997 terdiri dari: 871 orang SD; 105 orang SLTP; 35 orang SLTA ; dan 1 orang Sarjana.

Potensi Perekonomian dan Mata Pencarian Penduduk

Penduduk Desa Sinar Jaya mayoritas menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Keadaan mata pencarian yang ditekuni penduduk desa Sinar Jaya hanya diperoleh data tahun 1997, yaitu terdiri dari: 637 orang petani; 25 orang buruh tani; 20 orang pedagang; 12 orang buruh bangunan; 8 orang Pertukangan; dan 6 orang Pegawai Negeri.

Para petani di desa Sinar Jaya dalam mengelola pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, disamping menggunakan cara-cara tradisional juga telah mengenal cara modern. Dalam mengairi persawahan mereka menggunakan tiga sistem irigasi, yaitu: 1. Irigasi setengah teknis dengan luas lahan 40 hektar; 2. Irigasi sederhana teknis dengan luas lahan 20 hektar; dan 3. Irigasi di luar kedua sistem tersebut berjumlah 7 hektar. Mereka juga telah menggunakan jenis-jenis bibit baru, menggunakan pupuk urea dan jenis lainnya, serta menggunakan obat dan penyempotan hama.

Pada bulan Juni 1998 desa Sinar Jaya terjadi serangan belalang dalam jumlah yang sangat luar biasa, mengakibatkan gagalnya hasil pertanian dan perkebunan penduduk. Pembasmian serangan belalang tidak dapat dilakukan secara optimal, karena sebagian penduduk desa masih berpegangan pada kepercayaan-kepercayaan yang menyebutkan bahwa hewan tersebut dilarang untuk dibunuh. Pelarangan tersebut terutama dikemukakan oleh tokoh agama setempat dengan menggunakan berbagai dalil agama Islam sebagai dasarnya. Selain itu, di desa ini beberapa tahun yang silam pernah juga terjadi bencana kekeringan, akibat dari kemarau panjang.

Seiring terjadinya krisis moneter yang menimpa bangsa Indonesia saat ini, diantara penduduk Desa Sinar Jaya terutama yang memiliki hasil kopi dan lada merupakan berkah tersendiri. Karena kopi dan lada merupakan komoditi ekspor yang diperdagangkan secara internasional harganya meningkat drastis sejalan dengan meningkatnya nilai kurs dollar. Diantara mereka ada yang membeli mobil, motor, peralatan rumah tangga, perbaikan dan pembangunan rumah dan lain-lain.

Meskipun harga kopi dan lada sangat tinggi, menurut beberapa informan, produksi kopi dan lada mereka tahun ini menurun cukup tajam, seiring terjadinya musim kemarau yang cukup panjang, bahkan tanaman pohon kopi dan lada mereka ada yang mati. Juga munculnya jenis hama baru yang menyerang pohon kopi dan lada.

Hasil pertanian Desa Sinar Jaya adalah padi, kopi, lada, cengkeh, ubi kayu, pisang dan palawija. Desa Sinar Jaya juga menghasilkan ayam, itik dan kambing/domba.

Permasalahan yang dihadapi penduduk desa Sinar Jaya adalah kemampuan permodalan dan sarana dan prasarana yang terbatas. Juga kurang memadainya kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki, serta rendahnya etos kerja (mereka lebih banyak menunggu). Jika mendapat penghasilan, pola pikir mereka cenderung konsumtif, setelah habis mereka mencari pinjaman dengan sistem ijon, keadaan

ini menyebabkan mereka belum mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

Menurut penuturan beberapa informan, budaya santai, malas dan konsumtif sudah menjadi bagian dari kehidupan penduduk desa Sinar Jaya, terutama penduduk pribumi Lampung atau penduduk pendatang asal Sumatera Selatan (suku Samendo dan Ogam) yang sudah lama menetap. Mereka umumnya kalah bersaing dengan penduduk pendatang dari Jawa Barat (suku Sunda) dan Jawa Tengah (suku Jawa). Budaya santai, malas (lebih banyak menunggu) dan konsumtif inilah menyebabkan penguasaan pemilikan lahan yang semula banyak dikuasai oleh penduduk pribumi Lampung dan penduduk pendatang asal Sumatera Selatan (Samendo dan Ogam) beralih kepemilikannya kepada suku pendatang berasal dari Jawa Barat yang merupakan jumlah penduduk terbanyak saat ini (sekitar 80% suku Sunda).

Sifat konsumtif tidak hanya terjadi pada penduduk pribumi, akan tetapi juga penduduk pendatang, hal itu diperlihatkan pada saat musim panen tiba. Biasanya hasil panen digunakan untuk membeli kebutuhan yang kurang penting dan produktif, seperti motor, mobil, peralatan elektronik, dll. Setelah masa paceklik datang, maka barang-barang tersebut dijual. Hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan adakalanya untuk melunasi pinjaman dengan sitem ijon atau gadai.

Dengan demikian diindikasikan bahwa penduduk desa Sinar Jaya kurang memiliki semangat untuk bekerja keras agar mereka terlepas dari tekanan kemiskinan. Budaya seperti itu, menurut Koentjaraningrat (1969:10) tidak dapat diandalkan untuk ikut dalam pemangunan ekonomi. Sebab, perekonomian suatu daerah akan berkembang, kalau dalam masyarakat yang bersangkutan ada sejumlah orang yang mempunyai bakat berusaha dan didukung iklim sosial budaya yang cocok untuk memungkinkan para wirausahawan itu untuk berusaha. Pada kondisi seperti itulah aktifitas ekonomi dapat berjalan.

Apalagi keadaan itu kurang didukung oleh sarana dan prasarana perekonomian seperti belum adanya KUD, pasar, toko, kendaraan umum roda empat yang tidak rutin, letaknya jauh dari lembaga keuangan seperti bank (wilayah kecamatan Tanjung Raja belum memiliki bank). Sarana dan prasarana ekonomi yang ada di desa Sinar Jaya adalah hanya terdapat 20 warung kecil.

Sementara itu sarana dan prasarana sosial yang ada di desa Sinar Jaya, yaitu: 1 SD Negeri dengan 2 gedung, 6 guru dan 168 murid, dan 1 madrasah Ibtida'iah dengan 2 gedung, 3 guru dan 96 murid. Sarana olah raga: 3 lapangan bola volly, 2 lapangan bulutangkis, 1 lapangan bola kaki. Sarana komunikasi: 57 buah TV dan 115 radio. Sarana angkutan: 30 buah sepeda dan 35 buah sepeda motor, 4 kendaraan roda empat. Sarana irigasi 2000 meter dengan 6 buah gorong-gorong. Keadaan perumahan penduduk terdiri dari 32 rumah permanen, 117 rumah semi permanen dan 148 rumah sederhana. Desa ini belum memiliki kantor desa. Sarana keamanan terdapat 4 pos siskamling dengan 18 orang hansip.

Di desa Sinar Jaya juga belum terdapat Puskesmas/ Puskesmas pembantu. Prasarana kesehatan yang ada adalah 1 orang Mantri, 3 orang dukun bayi dan 1 orang dukun sunat.

Miskinnya sarana dan prasarana (fasilitas) perekonomian, sosial dan transportasi mengakibatkan desa Sinar Jaya termasuk desa miskin atau desa IDT yang agak terisolasi. Menurut Soedjatmoko (1995:68) apabila tingkat keterisolasian itu tinggi, hal itu akan berkorelasi positif terhadap tingkat kemiskinan masyarakat setempat.

Sebagai sebuah desa miskin, desa Sinar Jaya dalam beberapa tahun belakangan ini cukup mendapat perhatian dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat. Hal itu dapat dilihat dari bentuk bantuan yang pernah diterima warga masyarakat desa Sinar Jaya, antara lain: pada tahun 1994 pernah menerima bantuan bibit padi dari departemen pertanian. Dalam rangka bulan bakti LKMD Nasional tahun 1996, 10 kepala keluarga mendapat bantuan dana pemugaran rumah sebesar Rp.300.000/per-KK dan

bantuan yang sama diberikan lagi untuk 10 KK pada tahun 1997. Bentuk bantuan yang diberikan tanpa bunga, dan diharapkan dapat bergulir kepada keluarga yang memerlukan. Ternyata tidak ada satupun yang dapat mengembalikan bantuan tersebut.

Menurut masyarakat, penyebab tidak dikembalikannya bantuan tersebut dikarenakan tidak ada aparat yang mengawasi dan memungutnya, juga masyarakat tidak tahu kemana harus membayarnya atau menyalurkannya. Selain itu, memang diantara mereka yang menerima bantuan panennya tidak berhasil, sehingga tidak mampu mengembalikan uang pinjaman tersebut.

Desa Sinar Jaya juga memperoleh bantuan program IDT sejak tahun 1994-1995 s/d 1996-1997 (3 tahun) berturut-turut sebesar Rp.20 juta pertahun. Bantuan tahap pertama (1994-1995) sebesar Rp.20 juta diwujudkan dalam bentuk bibit ternak kambing, tetapi bantuan tersebut gagal, karena bibit kambing yang diberikan banyak menderita sakit kurap dan rabun. Kemudian bantuan tahap kedua (1995/1996) sebesar Rp.20 juta diwujudkan dalam bentuk bibit tanaman nilam, dan inipun gagal total, karena masyarakat belum terbiasa, cuaca tidak cocok dan terjadi kemarau panjang. Selain itu, diantara warga masyarakat yang berhasil, ternyata tidak ada yang mau membelinya (pemasarannya sulit). Sedang bantuan tahap ketiga (1996/1997) sebesar Rp.20 juta oleh masyarakat setempat diusahakan untuk pertanian dan usaha pemeliharaan dan penyewaan ternak kerbau. Menurut masyarakat untuk usaha pertanian gagal total, karena diserang hama belalang, sedang usaha pemeliharaan dan penyewaan kerbau cukup berhasil.

Kegagalan program IDT di desa Sinar Jaya, menurut masyarakat disebabkan program kegiatan ditentukan dari atas, bukan berdasarkan keinginan masyarakat. Tenaga pendamping hanya ada pada tahap awal, itupun hanya aktif di desa Sinar Jaya selama 3 bulan. Setelah itu tidak muncul lagi. Selain itu, sejak program IDT ini digulirkan kepada masyarakat, sama sekali tidak ada kontrol atau pengawasan dari instansi terkait. Bahkan menurut masyarakat

penjelasan awal yang disampaikan petugas sewaktu dana digulirkan kepada masyarakat tidak dijelaskan kepada siapa dana tersebut dikembalikan atau digulirkan. Ada pula petugas yang menerangkan bahwa dana bantuan itu tidak perlu dikembalikan. Oleh sebab itu masyarakat menganggap seolah-olah pemerintah memberikan dana bantuan secara cuma-cuma untuk membantu masyarakat miskin.

Desa Sinar Jaya juga mendapat Dana Bantuan Desa (BanDes) dari pemerintah sebesar Rp.6,5 juta. Menurut masyarakat dana bantuan desa yang diterima oleh mantan Kepala Desa tidak dikelola secara terbuka (transparan). Bahkan ada dana yang digunakan untuk membuka usaha pertokoan yang dikelola oleh keluarga mantan kepala desa. Bantuan lain, adalah bantuan dari GNOTA untuk murid SD yang tidak mampu yang diterima pada awal tahun 1998 sebanyak 10 paket. Bantuan itu berupa alat-alat sekolah, seperti: tas, sepatu, pakaian seragam dan alat-alat tulis.

Desa Sinar Jaya juga dalam tahun 1998/1999 mendapat bantuan berupa Proyek Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) dan Program Pembangunan Jalan Poros Desa (P2JPD) sebesar Rp.140 juta. Dana ini dipergunakan untuk pembangunan sarana jalan yang menghubungkan antara Dusun I dengan Dusun III. Pelaksanaan pembangunan jalan ini sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat desa Sinar Jaya. Proyek ini pada saat penelitian dilakukan sedang dalam tahap pembangunan dan direncanakan dapat diselesaikan dalam tahun anggaran ini.

Informasi dari masyarakat menyatakan pelaksanaan pembangunan jalan ini tidak sesuai dengan rencana semula sebagaimana yang telah disepakati masyarakat. Antara lain, lebar jalan lebih sempit dari yang direncanakan, penduduk desa Sinar Jaya yang mengerjakan banyak yang belum memperoleh upah yang dijanjikan dan mereka menghentikan keterlibatannya, dan pengerjaan selanjutnya dilakukan oleh penduduk dari desa lain.

Program bantuan lainnya, PMB-LIPI dalam rangka program pemberdayaan masyarakat miskin pada tahun 1998 menggulirkan

dana bantuan kepada masyarakat desa Sinar Jaya sebesar Rp.37 juta. Pada tahun 1999 melalui Proyek PDM-DKE, desa Sinar Jaya mendapat bantuan sebesar Rp.20 juta. Desa Sinar Jaya juga menerima bantuan PTMAS (Program Tambahan Makanan Anak Sekolah); JPS-Kesehatan; JPS-OPK, dan Kredit Usaha Tani (KUT).

Untuk mengetahui pelaksanaan berbagai program bantuan pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan, akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab VI mengenai Pandangan Masyarakat Miskin di Desa Sinar Jaya.



BAB IV

PANDANGAN PEJABAT DAN APARAT TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TASKIN

Berdasarkan Laporan Pengarahan Gubernur Daerah Tingkat I Provinsi Lampung pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program DMSS-GDK (Desaku Maju Sakai Sambayan-Gerakan Kembali Ke-desa) tanggal 14 Juni 1999, hingga tahun 1996 tercatat 10,65% dari total penduduk Provinsi Lampung masih berada di bawah garis kemiskinan, atau sebesar 48,17% dari jumlah Kepala Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Jumlah desa tertinggal/IDT tercatat 758 desa tertinggal atau 39,58% dari jumlah desa di Provinsi Lampung. Pada akhir tahun anggaran 1998/1999 terjadi penurunan jumlah desa tertinggal/IDT sebanyak 138 desa atau 18,28% dari total 758 desa tertinggal/IDT di Provinsi Lampung. Sementara itu terjadi peningkatan perbaikan kesejahteraan masyarakat desa tertinggal sekitar 20% dari keluarga Pra Sejahtera menjadi keluarga Sejahtera I.

Angka ini kebenarannya masih perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan jumlah kemiskinan situasional akibat krisis ekonomi. Menurut Dra. Ellya Muchtar, Kabid. Ekonomi BAPPEDA Tingkat I Provinsi Lampung, data tersebut sejalan dengan pendataan BPS yang menunjukkan desa tertinggal semakin menurun di Provinsi Lampung. Begitu pula jumlah keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) berdasarkan hasil evaluasi BAPPEDA Provinsi Lampung semakin menurun, yakni dari Pra Sejahtera (PS) menjadi Keluarga Sejahtera I (KS-I), dan dari KS-I menjadi KS-2.

Faktor penurunannya, menurut Ellya Muchtar dikarenakan adanya intervensi pemerintah yang menyebabkan terjadi perubahan. Namun, akurasi data tersebut perlu di evaluasi kembali. Karena, kriteria desa tertinggal dan pendataannya dilakukan oleh BPS.

Sedangkan kriteria dan pendataan keluarga Pra Sejahtera (PS), Keluarga Sejahtera I (KS-I), Keluarga Sejahtera 2 (KS-2) dan Keluarga Sejahtera 3 (KS-3) dilakukan oleh BKKBN.

Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai program bantuan mengatasi masyarakat miskin. Dalam studi ini telah dilakukan wawancara mendalam dengan sejumlah pejabat dan aparat di instansi Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara, dan Kecamatan Tanjung Raja. Wawancara lebih difokuskan pada pelaksanaan program bantuan IDT; Takesra/Kukesra; JPS (JPS-OPK; JPS-Kesehatan; PDM-DKE); PTMAS; P3DT; dan Program mengatasi kemiskinan DMSS-GKD Provinsi Lampung, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kemiskinan di Provinsi Lampung.

Uraian berikut ini adalah berbagai tanggapan dan pandangan yang dikemukakan pejabat dan aparat yang diwawancarai.

Drs. Muhono, Kabag. Tata Usaha Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Lampung, program IDT operasionalnya langsung ke desa dibawah pembinaan Camat dan Kepala Seksi PMD di tingkat kecamatan. Sedangkan PMD di tingkat Provinsi/Tingkat I dan PMD di tingkat II/Kabupaten/Kotamadya sifatnya hanya memantau. Dalam pelaksanaannya, kelemahan yang paling mendasar adalah faktor tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah terutama dalam mengelola dan memanfaatkan bantuan yang diberikan.

Drs. John K, petugas pendata Biro Pusat Statistik Provinsi Lampung menyatakan pelaksanaan program IDT di Provinsi Lampung terutama masyarakat miskin yang menjadi sasaran intervensi bantuan, kadangkala kurang tepat. Misalnya untuk tahun 1998 dan 1999 jika yang menjadi sasaran seperti petani lada, kopi atau petani tahunan, tampaknya kurang relevan untuk diberikan. Kenapa ?. Karena dengan kenaikan kurs dollar, harga kopi dan lada menjadi meningkat. Misalnya harga lada pernah mencapai Rp.45.000,- perkilogram, dan harga kopi Rp.12.500,- perkilogram.

Kenaikan harga lada dan kopi juga diikuti dengan naiknya upah buruh harian diperkebunan lada dan kopi. Dengan demikian pendapatan mereka menjadi cukup tinggi, meskipun keadaan rumah mereka dengan lantai tanah, dinding dari gedek, atap dari daun yang menjadi kriteria masyarakat miskin.

Selain itu, khususnya penduduk asli Lampung dan penduduk pendatang yang sudah lama menetap di Lampung, ada kecenderungan malas. Meskipun mereka memiliki tanah yang luas, akan tetapi yang mengerjakan tanah tersebut orang lain. Baik dengan sistem bagi hasil, sistem sewa, sistem pengupahan, bahkan seringkali mereka menjual tanahnya. Jika harta benda habis terjual, kadangkala mereka melakukan tindakan kriminal. Penduduk seperti itu, sukar untuk maju, meskipun mereka diberikan bantuan IDT atau bantuan lainnya.

Ir. Dessy, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kanwil. Departemen Pertanian Provinsi Lampung mengemukakan penduduk desa IDT umumnya pekerjaan utama mereka di pertanian dan perkebunan. Dalam rangka mengembangkan SDM bagi penduduk desa IDT, Departemen Pertanian menempatkan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di setiap desa IDT. Dan ini merupakan peran serta departemen pertanian dalam upaya pengentasan kemiskinan. Petani di daerah ini SDM-nya rendah, kalau tidak dibantu, tidak jalan, lebih-lebih penduduk asli Lampung, mereka lebih banyak menunggu, bahkan cenderung agak malas. Kadangkala maksud kita membantu masyarakat, tetapi justru masyarakat merasa tidak dibantu.

Kelemahan yang paling mendasar dari instansi pemberi bantuan adalah dalam hal perencanaan. Yang dibutuhkan masyarakat A, tetapi yang diberikan bantuan B. Mereka menyusun perencanaan seharusnya menggunakan data yang benar dan berasal dari bawah, yaitu dengan terlebih dahulu mempelajari potensi desa dan penduduk desa yang akan diberikan bantuan. Selain itu, peran serta kaum perempuan dalam pengentasan kemiskinan dalam kenyataannya kurang mendapat perhatian yang semestinya. Padahal, kaum perempuan itu lebih teliti, lebih hemat dan lebih bertanggungjawab

atas pengembalian atau pengguliran dana bantuan yang diberikan. Ini perlu dipertimbangkan di masa mendatang. Karena kaum perempuan lebih memungkinkan untuk cepat terlaksananya pengentasan kemiskinan. Mengingat kaum perempuan di pedesaan lebih banyak waktu untuk mengurus dan mengelola dana bantuan yang diberikan atau kegiatan usaha yang dilakukan.

Kelemahan lainnya, adalah masalah pengawasan terhadap bantuan yang diberikan. Selama ini, aspek pengawasan masih kurang mendapat perhatian, bahkan ada kecenderungan setelah bantuan diberikan/digulirkan, pihak pemberi bantuan menganggap sudah selesai tugasnya, dan masyarakat dibiarkan berkembang sendiri. Hal itu seringkali hanya dianggap untuk mengejar target suatu proyek, berhasil atau gagal bukan menjadi sasarannya, yang penting target proyek tercapai. Bukan berdasarkan atas kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Selain itu, juga belum adanya koordinasi antara instansi pemberi bantuan, sehingga kadangkala terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Drs. Widya Supardi, Kepala Bidang Bina Program Kanwil. BKKBN Provinsi Lampung, hal yang tidak kalah pentingnya adalah dalam hal menentukan kriteria desa IDT. Biro Pusat Statistik (BPS) lebih melihat fisik dan fasilitas desa, karenanya IDT bukan penduduk miskin, tetapi yang dilihat adalah desa miskin. BPS melihat keadaan penduduk secara global dan dihitungkan berdasarkan kalori makan setiap hari selama seminggu. Kemudian secara nasional dihitung rata-rata, dan dikatakan penduduk miskin apabila perhari di bawah 2100 kalori. Sedangkan BKKBN kriteria penduduk miskin dilihat dari keadaan keluarga dengan berbagai variabel, seperti: kondisi perumahan, pakaian, tempat pengobatan, ketaatan beribadah dan lain-lain.

Fauzi Hasan, SE, Wakil Ketua BAPPEDA Kabupaten Lampung Utara, mengemukakan perkembangan desa miskin dan penduduk desa miskin di Kabupaten Lampung Utara menurut Data BPS jumlah desa IDT dan penduduk miskin menurun. Sebaliknya,

data dari BKKBN tentang keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) justru jumlahnya meningkat. Bagaimana ini bisa terjadi, bukankah seharusnya desa IDT menjadi turun. Begitu pula keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) juga turun. Penyebabnya, karena kriteria yang ditetapkan berbeda. BPS menentukan kriteria IDT dan non IDT. Sedangkan BKKBN menentukan kriteria keluarga Pra Sejahtera (PS), Keluarga Sejahtera I (KS-I), Keluarga Sejahtera 2 (KS-2), dan Keluarga Sejahtera 3 (KS-3).

BPS menentukan desa IDT dan non IDT dilihat dari segi fisik, seperti sarana dan prasarana jalan yang mampu membuat masyarakat bergerak dengan cepat, tingkat kualitas hidup dan lain-lain. Misalnya jika suatu desa semula jalan dari tanah, kemudian berubah menjadi jalan yang dikeras/diaspal, maka status desa tersebut dari IDT menjadi non IDT. Dalam menentukan desa IDT dan non IDT, BPS menentukan berbagai kriteria variabel, kemudian dijumlahkan, apabila nilainya di bawah 49, maka statusnya desa IDT, dan jika di atas 49 statusnya desa non IDT.

Di samping kriteria yang ditetapkan BPS dan BKKBN, terdapat pula kriteria yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Lampung dengan kriteria desa rawan pangan dan penduduk rawan pangan dengan desa dan penduduk yang tidak rawan pangan. Istilah rawan pangan belum tentu miskin. Karena kemiskinan di Lampung Utara ada yang sifatnya situasional. Misalnya, kalau terjadi kemarau panjang, maka kemungkinan terjadi rawan pangan, jika tidak terjadi kemarau panjang, rawan pangan tidak terjadi.

Atas dasar hal tersebut, menurut Fauzi Hasan pemerintah pusat perlu menyatukan bahasa dalam menentukan arah kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan, termasuk kriterianya. Tidak hanya berdasarkan atas kepentingan dari masing-masing instansi. Sebagai pejabat dan aparat di daerah, kita tidak ada keberanian untuk merubah kriteria desa IDT dan keluarga miskin sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Meskipun itu sebenarnya tidak tepat, tetapi

terpaksa juga diikuti. Karena jika tidak diikuti akan menimbulkan dampak atau resiko, misalnya kalau desa atau penduduk miskin jumlahnya kecil, maka kita akan mendapatkan dana bantuan juga kecil. Sebaliknya, kalau desa dan penduduk desa miskin jumlahnya besar, maka bantuan yang akan diterima juga besar. Keadaan ini tentu akan dipertanyakan kebenarannya. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan tidak menyamaratakan di setiap daerah. Atas dasar itu, sebaiknya daerahlah yang menentukan kriteria desa miskin dan keluarga/penduduk miskin di daerahnya.

Lebih lanjut, Fauzi Hasan mengemukakan orang miskin atau keluarga miskin, bagi orang Lampung asli baru dianggap sangat miskin apabila orang atau keluarga miskin tersebut "tidak mampu beli beras", atau istilah setempat "tidak mampu makan beras". Ciri lain, malas atau tidak mau bekerja dan banyak tinggal di rumah, dan tidak ada cerita mereka tidak punya lahan. Begitu pula ukuran pakaian, meskipun mereka sehari-hari berpakaian compang camping atau lusuh, bukan berarti tidak punya pakaian. Karena kebiasaan orang asli Lampung, terutama di pedesaan pakaian baru umumnya digunakan untuk bepergian, menghadiri acara undangan pesta perkawinan, pada saat lebaran dan lain-lain. Kemudian setelah pakaian digunakan, disimpan kembali di almari. Oleh sebab itu, jika orang/keluarga asli Lampung itu masih mampu makan 2 kali sehari dan ada makanan tambahan (istilah setempat "penunggu"), mampu mengolah lahan, masih mampu berkunjung ke desa lain, mampu berobat ke Puskesmas dan mampu menyekolahkan anak-anaknya, maka yang bersangkutan bukan orang/keluarga miskin.

Perlu diketahui, penduduk asli Lampung itu umumnya dahulu tinggal disepanjang sungai. Sungai bagi mereka merupakan urat nadi kehidupannya. Sungai tempat mereka mengeduh ternak kerbau. Kalau dulu dilihat dari fisik rumah kelihatannya kumuh dan hampir roboh, tetapi mereka punya 40 ekor kerbau. Kepemilikan kerbau/sapi dahulu merupakan ciri khusus dalam menentukan orang itu kaya atau tidak. Sungai juga merupakan lebung/lubuk untuk usaha perikanan. Karena

itu, dahulu mereka sangat menjaga kelestarian sungai. Sekarang sungai/lebung/lubuk dan lingkungan alam disekitarnya telah dirusak oleh perusahaan HPH, pabrik sawit, pabrik tapioka dan lain-lainnya.

Keadaan itu, mengakibatkan ketika musim kemarau air sungai menjadi turun dengan drastis, dan jika musim hujan terjadi banjir. Selain itu, populasi ikan dan habitat lain yang hidup di sungai menjadi semakin sedikit, dan itu sangat mengancam kehidupan penduduk asli Lampung. Akibat lebih lanjut, mata pencaharian penduduk asli Lampung berpindah dari subsistem pertanian tanaman keras ke sistem pertanian seperti yang dilakukan orang Jawa. Begitu pula cara mengembangkan usaha perikanan yang semula dengan sistem lebung/lubuk berubah menjadi sistem kerambak ikan. Perubahan ini menimbulkan masalah bagi penduduk asli Lampung. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir ini limbah dari perusahaan HPH, pabrik sawit dan tapioka menunjukkan peningkatan yang sangat mengkhawatirkan dan akan menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat. Oleh karena itu sudah selayaknya mendapat perhatian pemerintah terutama dalam melaksanakan berbagai program bantuan untuk masyarakat miskin.

Ain Sobirin, SH, Kepala Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lampung Utara mengemukakan kendala pelaksanaan program IDT di Kabupaten Lampung Utara, antara lain disebabkan dana pengguliran kadangkala terlambat. Juga pengguliran dana bantuan IDT yang diberikan tidak cocok dengan data masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan. Yang mendapat dana IDT seharusnya satu kelompok 30 orang, tetapi kenyataannya hanya 20 orang yang menerimanya. Selain itu, terdapat pula ketika mengajukan satu kelompok 40 anggota, tetapi pada saat dana turun yang diajukan untuk menerima dana IDT hanya 15-20 anggota. Faktor lainnya, bagi orang asli Lampung rasa harga dirinya begitu besar. Sebenarnya banyak diantara mereka yang seharusnya mendapat dana bantuan IDT, tetapi mereka tidak mau.

Pada tahun 1994/1995 atau tahun pertama program IDT diperkenalkan hanya sebagian kecil orang Lampung asli yang mau menerima bantuan program IDT. Tetapi setelah mereka tahu dana bantuan program IDT cukup bermanfaat dan tanpa bunga, dan tidak ada keharusan mengembalikan, maka pada tahun 1995/1996 orang Lampung asli sudah banyak yang mengajukan dana bantuan program IDT dan mereka mulai melepaskan harga dirinya.

Kelemahan lainnya, bentuk bantuan program IDT berupa uang. Misalnya mereka ingin membeli ternak sapi/kambing, apakah betul-betul melaksanakannya, semua diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat penerima bantuan. Peran PMD Kabupaten hanya bersifat menerima usulan dari kecamatan. Karena itu, kadangkala terjadi kasus yang dilaporkan ternak sapi/kambing bantuan yang diterima, sebelum melahirkan sudah dijual, atau yang dilaporkan ternaknya mati.

Dalam menentukan kelompok dan anggota kelompok penerima dana bantuan, termasuk jenis kegiatan usaha dari Kepala Desa dan LKMD. Dan secara prinsip yang berhak mendapatkan bantuan IDT adalah keluarga miskin di desa yang belum pernah mendapat bantuan. Namun dalam kenyataannya, mereka yang telah menerima dana bantuan IDT tahun sebelumnya mendapat lagi dana bantuan IDT tahun berikutnya. Juga, mereka yang telah mendapat bantuan IDT mendapat jenis program bantuan lainnya, seperti Kukesra/Takesra, JPS, PDM-DKE, P3DT dan lain-lain.

Di samping hal di atas, umumnya masyarakat dilingkungan desa penerima bantuan itu masih satu rumpun keluarga, dan sulit mencari mereka yang tidak ada hubungan keluarga dengan aparat desa setempat (Kepala Desa/Sekretaris Desa/ Pamong desa, LKMD, RT/RW dan lain-lain). Jadi dalam menentukan anggota kelompok sukar melepaskan diri dari hubungan *patron-clien*. Juga masyarakat desa penerima bantuan belum terbiasa (ahli) dalam mengelola pemanfaatan dana bantuan IDT, sementara itu tahap persiapan pembinaan terhadap mereka sebelum dana bantuan disalurkan, hanya

dalam waktu singkat, bahkan kadangkala tidak dipersiapkan sama sekali, akibat mengejar target. Sehingga timbul kesan kurang tepat sasaran penerima dana bantuan IDT, termasuk jenis kegiatan usahanya. Apalagi dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kepala desa/aparat desa yang melakukan pemaksaan kehendak. Dan dalam memberikan bantuan program IDT, kadangkala kurang memperhatikan keadaan musim tanam dan musim panen.

Tenaga pendamping umumnya berasal dari luar desa IDT yang kurang memahami keadaan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, perlu mempersiapkan tenaga pendamping yang berasal dari desa yang bersangkutan, agar lebih memahami dan menguasai keadaan masyarakat desa setempat. Jika tenaga pendamping dari luar desa penerima bantuan, sebaiknya tenaga pendamping itu sudah ada di desa sebelum dana bantuan program IDT disalurkan. Selama ini, tenaga pendamping baru ada di desa setelah dana bantuan diberikan. Itupun hanya pada awal program bantuan IDT diperkenalkan kepada masyarakat desa IDT.

Tenaga pendamping diharapkan berpendidikan minimal tamat SLTA, bahkan jika memungkinkan D3 di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain-lain yang dibutuhkan masyarakat desa setempat. Dengan demikian, usulan program kegiatan betul-betul datang dari bawah melalui pembinaan tenaga pendamping. Selama ini yang terjadi program kegiatan bukan datang dari bawah, tetapi lebih ditentukan dari atas. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan IDT yang terlalu mengejar target atau kuantitatif daripada keberhasilan yang sesungguhnya.

Mengenai data desa IDT dari BPS, menurut Ain Sobirin perlu dikaji ulang, karena banyak yang tidak tepat. Juga adanya kesan masyarakat desa IDT di daerah ini yang menganggap dana bantuan IDT adalah pemberian pemerintah yang tidak perlu dikembalikan atau menganggap itu sudah menjadi kewajiban pemerintah. Anggapan seperti itu adalah keliru dan perlu dilakukan penerangan kepada masyarakat desa miskin bahwa bantuan itu untuk desa miskin yang

perlu digulirkan kepada masyarakat miskin lainnya dalam lingkungan desa.

Sasaran masyarakat miskin perlu dipelajari kriterianya. Karena konsep orang miskin, desa miskin, keluarga miskin antara instansi satu dengan yang lainnya berbeda. Antara pejabat/aparat yang satu dengan yang lain juga berbeda. Menurut Air Sobirin, konsep orang miskin menurut orang asli Lampung, adalah kalau orang/keluarga tersebut sudah tidak dapat lagi mengikuti kehidupan tetangga di sekitarnya, misalnya makan sulit, tidak mempunyai penghasilan tetap dan lain-lain, itu sudah dianggap miskin.

Pendapat lain, Drs. Rifid Arief, mantan Pembantu Bupati Lampung Utara, sekarang menjabat Ketua BAPPEDA Kabupaten Way Kanna, konsep lokal tentang orang/keluarga miskin adalah:

- (1) Kondisi fisik rumahnya seperti: dinding dari bambu/gedek, lantai tanah, atap dari daun;
- (2) Lingkungan di sekitar rumahnya kumuh dan kotor tidak terawat;
- (3) Pakaian yang digunakan tidak layak (compang-camping);
- (4) Kemampuan merawat kebersihan diri kurang, seperti mandi tidak pakai sabun, gosok gigi tidak pakai odol dan lain-lainnya;
- (5) Badannya kurus (tulang rusuknya keluar);
- (6) Kemampuan makan jauh dari sempurna (makan apa adanya yang bisa dimakan, kadangkala hanya makan 1 kali sehari);
- (7) Merawat kesehatan ternyata berobat ke mantri/bidan saja tidak mampu untuk membayarnya;
- (8) Tidak mampu menyekolahkan anaknya di tingkat SD;
- (9) Kemampuan untuk berjalan/bepergian ke kota rendah.

Informasi dan pandangan tentang pelaksanaan program IDT di Kabupaten Lampung Utara yang cukup lengkap dikemukakan oleh Drs. Mayun Sulki, Kepala Seksi Pengembangan Pembangunan

Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Utara. Ia mengemukakan pelaksanaan program IDT di Kabupaten Lampung Utara dimulai sejak tahun anggaran 1994/1995 s.d. 1998/1999. Program IDT sebenarnya hanya tiga tahun (1994/1995 s.d 1996/1997), tetapi karena ada pemekaran desa baru, program IDT dilanjutkan dua tahun (1997/1998 s.d 1998/1999).

Data jumlah desa IDT, Pokmas, Jumlah Kepala Keluarga Miskin dan Jumlah jiwa penduduk miskin yang menerima bantuan program IDT selama 5 tahun (1994/1995 – 1998/1999) di Kabupaten Lampung Utara seperti terlihat pada Tabel IV.1. Sedangkan jumlah prosentase jenis usaha yang dikembangkan oleh Rumah Tangga/KK miskin penerima bantuan IDT selama 5 tahun (1994/1995 – 1998/1999) di Kabupaten Lampung Utara seperti terlihat pada Tabel IV.2.

Tabel IV.1

Jumlah Desa IDT, Pokmas, Kepala Keluarga Miskin, dan Penduduk Miskin Penerima Dana Bantuan Program IDT di Kabupaten Lampung Utara Tahun 1994/1995 - 1998/1999

Tahun Pelaksanaan Bantuan	Jumlah Desa IDT	Jumlah Pokmas IDT	Jumlah K K Miskin	Jumlah Jiwa Penduduk Miskin
Th. 1994/1995	254	1.141	32.207	114.442
Th. 1995/1996	283	984	26.835	135.256
Th. 1996/1997	306	1.007	26.077	109.997
Th. 1997/1998	41	119	2.842	15.513
Th. 1998/1999	23	56	1.255	7.252

Sumber Data: PMD Kabupaten Lampung Utara, 1999

Tabel IV.2
Jenis Usaha Yang Dikembangkan Kepala Keluarga Miskin
Penerima dana Bantuan Program IDT
Di Kabupaten Lampung Utara
Th. 1994/1995 – 1998/1999

No	Kategori Jenis Usaha	Th.94/95 % N=32.207	Th.95/96 % N=26.835	Th.96/97 % N=26.077	Th.97/98 % N=2.842	Th.98/99 % N=1.255
1	Ternak Kambing	38,47	26,10	12,52	3,36	12,77
2	Ternak Sapi/ Kerbau	22,70	43,35	52,24	62,18	40,42
3	Ternak Ayam/Itik	5,33	1,82	0,15	0,84	6,38
4	Pertanian (padi, jagung, singkong, kedelai, kacang tanah)	10,51	18,62	9,89	0,84	4,26
5	Perdagangan	6,91	1,67	2,52	0,77	-
6	Perkebunan (Nilam, Serai)	2,73	0,76	-	0,93	4,26
7	Perikanan	1,44	-	-	-	-
8	Industri Rumah Tangga (Bata, tahu tempe, mebel)	1,29	0,91	1,68	0,46	-
9	Usaha lain- lain (Saprodi, simpan pinjam, gilingan padi, jasa dll.	0,57	7,78	27,73	23,02	31,91
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data: PMD Kabupaten Lampung Utara, 1999

Adapun data mengenai realisasi dana bantuan IDT di Kabupaten Lampung Utara hanya diperoleh data anggaran tahun 1994/1995 dan 1995/1996.

Dalam tahun anggaran 1994/1995 jumlah dana bantuan IDT yang direalisasikan kepada masyarakat penerima bantuan IDT sebesar Rp.5.090.640.000,-. Dari jumlah tersebut, diantaranya 33,67% (Rp.1.710.436.000,-) dipergunakan masyarakat miskin untuk usaha peternakan sapi/kerbau/kambing/domba; 25,51% (Rp.1.295.908.000,-) untuk usaha pertanian/perkebunan; 15,30% (Rp.777.240.000,-) untuk

usaha peternakan unggas (ayam/itik); 9,20% (Rp.467.360.000,-) untuk usaha perdagangan; 6,12% (Rp.316.216.000,-) untuk usaha perikanan; 4,08% (Rp.207.264.000,-) untuk usaha industri rumah tangga/kerajinan (batu bata, genteng, mebel dll), dan sisanya 6,12% (Rp.316.216.000,-) untuk kegiatan usaha lainnya (simpan pinjam, jasa dll). (**Sumber data:** PMD Kabupaten Lampung Utara, 1996).

Dalam tahun anggaran 1995/1996 jumlah dana bantuan IDT yang direalisasikan kepada masyarakat miskin penerima bantuan IDT sebesar Rp.5.640.000.000,-. Dari jumlah tersebut, diantaranya 35% (Rp.1.974.000.000,-) dipergunakan masyarakat miskin untuk usaha peternakan sapi/kerbau/kambing/domba; 25% (Rp.1.410.000.000,-) untuk usaha pertanian/perkebunan; 10% (Rp.564.000.000,-) untuk usaha peternakan unggas (itik/ayam); 8% (Rp.451.200.000,-) untuk usaha perdagangan; 5% (Rp.282.000.000,-) untuk usaha perikanan; 3% (Rp.169.200.000,-) untuk usaha industri/kerajinan (batu bata, genteng, mebel, dll); dan sisanya 14% (Rp.789.600.000,-) untuk kegiatan jenis usaha lainnya (simpan pinjam, jasa dll). (**Sumber Data:** PMD Kabupaten Lampung Utara, 1997).

Prosedur mendapat bantuan IDT adalah mengikuti petunjuk/pedoman yang telah ditetapkan, yaitu:

- (1) Sosialisasi program di tingkat aparat Kabupaten.
- (2) Sosialisasi program di tingkat aparat Kecamatan.
- (3) Aparat di tingkat kecamatan (Kasi. PMD Kecamatan) meneruskan ke desa IDT dalam wilayahnya.
- (4) Setelah disosialisasikan di desa, kemudian desa mendata orang-orang miskin di desanya.
- (5) Membentuk kelompok-kelompok di desa dipandu oleh LKMD dan aparat desa.
- (6) Setelah kelompok dibentuk, mereka bermusyawarah untuk menentukan jenis usaha (dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kasi. PMD Kecamatan).

- (7) Setelah disepakati jenis usaha yang akan dilakukan, dengan dibantu Kasi. PMD Kecamatan mereka menyusun proposal/DUP.
- (8) Proposal/DUP diajukan kepada Camat untuk ditandatangani, setelah ditandatangani di kirim ke Bupati dan PMD Kabupaten.
- (9) Setelah itu, dana bantuan IDT bisa dicairkan di BRI oleh kelompok masing-masing.

Penilaian layak dan tidaknya proposal yang diajukan adalah Camat, Kasi. PMD Kecamatan dan Kepala Desa yang bersangkutan. Dalam melakukan kegiatan usaha, seperti membeli ternak, bibit pertanian, biasanya mereka bantuan dari aparat di tingkat kecamatan atau kabupaten. Adakalanya jenis kegiatan usaha atas permintaan/keinginan Camat. Alasannya untuk mempermudah dalam hal pengawasannya.

Pengawasan pelaksanaan program IDT adalah aparat di tingkat kecamatan (Camat dan PMD) dan tingkat Kabupaten (PMD). PMD Kabupaten dalam melakukan pengawasan tidak bisa secara menyeluruh, dan sifatnya temporer, yaitu apabila terjadi kasus, baru PMD Kabupaten turun untuk menanganinya. Memang sebenarnya ada kewajiban untuk mengawasi, tetapi PMD Kabupaten memiliki aparat dan sumber dana yang terbatas. Sementara jumlah desa IDT jumlahnya cukup banyak. Karena itu, tugas pengawasan dilimpahkan kepada aparat di tingkat kecamatan, memperpendek jalur birokrasi.

Menurut Mayun Sulki, kebijakan program IDT itu bagus. Masalahnya, SDM masyarakat desa penerima bantuan kurang mendukung. Selain itu, program IDT dalam pelaksanaannya begitu banyak intervensi aparat di tingkat kecamatan. Begitu besarnya peran aparat di tingkat kecamatan, mengurangi peran masyarakat dari bawah, seperti dalam hal menentukan jenis kegiatan usaha, pengurus kelompok dan lain-lain. Alasan mereka agar mudah mengawasinya. Dan itu dijadikan alasan oleh masyarakat desa penerima bantuan program IDT apabila kegiatan usaha yang mereka lakukan mengalami kegagalan. Alasan lain yang juga sering dikemukakan

masyarakat penerima bantuan jika mengalami kegagalan dalam usahanya, antara lain dana bantuan digunakan untuk biaya anak sekolah, berobat, pertaniannya gagal terkena serangan hama, atau usaha ternaknya mati dan lain-lain.

Lebih lanjut, ia mengemukakan, bantuan program IDT, sesungguhnya jika aparat di tingkat Kecamatan itu jeli, merupakan potensi untuk mengembangkan wilayahnya. Sebab Camat-lah yang menentukan cair dan tidaknya dana bantuan, dan Camat pula yang menentukan jenis kegiatan usahanya. Bahkan camat dapat memberikan sanksi terhadap masyarakat penerima dana bantuan yang tidak melaksanakan dengan baik melalui musyawarah kelompok usaha yang dibentuk.

Kelemahan lainnya, dana bantuan program IDT itu oleh pemerintah pusat, PemDa Tk. I dan Tk. II dan Kecamatan merupakan dana hibah yang tidak ditarik kembali. Juga ada kecenderungan pemerintah pusat lebih mengejar target. Yang penting bagi pemerintah pusat, dana IDT sebesar Rp.60 juta ada di desa IDT.

Menurut petunjuk orang pusat (BAPPENAS) kalau sudah ada program, dana bantuan IDT segera diberikan. Kita di daerah umumnya mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat. Dulu pada awal program IDT diperkenalkan, setiap bantuan IDT tidak disertai surat perjanjian. Sekarang sudah ada surat perjanjian. Meskipun demikian, sebenarnya semua itu berpulang kepada masyarakat desa penerima bantuan itu sendiri. Apakah mereka ingin maju dan memanfaatkan dana bantuan yang diberikan dengan sebaik-baiknya atau tidak.

Hal lain, koordinasi antar instansi belum ada keterpaduan, umumnya baru bersifat program. Karenanya, masing-masing sektor kurang mendukung. Misalnya, kalau ada desa IDT yang ternak sakit, kita telpon ke dinas peternakan, dan dinas peternakan menjawab bahwa dana obat-obatan tidak ada, atau petugas ke lokasi desa tersebut dananya dari mana. Selain itu, masyarakat desa IDT sekarang ini sangat dijejali berbagai program bantuan yang menyebabkan mereka menjadi ketergantungan dan tidak ada upaya untuk

mengembangkan secara baik, apalagi mengembalikan atau menggulirkan dana bantuan yang diberikan. Yang sadar jumlahnya sangat kecil.

Kita di daerah ini serba salah, kalau ada tidak diberikan atau disalurkan, kita disalahkan pemerintah pusat, karena mengejar target. Setelah dana diberikan/dialurkan kepada masyarakat, kelemahan yang muncul adalah kurangnya pembinaan dan pengawasan.

Pada awal program IDT diperkenalkan, pembinaan dilakukan oleh sarjana pendamping. Belakangan tidak ada lagi sarjana pendamping. Padahal, tenaga pendamping ini cukup penting dalam membina masyarakat desa penerima bantuan. Peranan tenaga pendamping yang baik, cukup menentukan keberhasilan program bantuan IDT.

Menurut Mayun Sulki, secara umum kelemahan pelaksanaan program IDT di Kabupaten Lampung Utara, adalah:

- (1) Kurang berhasilnya sosialisasi program IDT kepada masyarakat, terbukti dari pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa dana IDT yang diberikan adalah "duit orang miskin yang harus dihabiskan dan tidak perlu dikembalikan", karenanya dana bantuan tidak digulirkan.
- (2) Administrasi pengelolaan keuangan kelompok (pembukuan) tidak tertata dengan baik.
- (3) Inventarisasi pengelolaan barang milik kelompok tidak teratur, bahkan kadangkala tidak tercatat.
- (4) Organisasi/kelembagaan kelompok tidak tertib, dan mekanisme kegiatan tidak jelas.
- (5) Peran tenaga pendamping di desa kurang efektif, karena SDM nya rendah. (Catatan: peran tenaga SP2W (Sarjana Pendamping Purna Waktu) dan SP3 (Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan) umumnya cukup baik. Sayangnya SP2W dan SP3 hanya pada awal program IDT diperkenalkan.

- (6) Jenis usaha kelompok yang dilakukan kadangkala tidak cocok dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan IDT.
- (7) Kurangnya memahami atau mempelajari keadaan masyarakat miskin lokal. Karena kemiskinan di Lampung Utara sifatnya situasional/temporer, seperti panen kopi/lada gagal atau harganya turun.

Usaha yang dilakukan PMD Kabupaten Lampung Utara untuk memacu keberhasilan program IDT dengan menyelenggarakan lomba kelompok masyarakat penerima IDT di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Pokmas terbaik I, II dan III memperoleh hadiah.

Dari Pokmas yang berhasil menjadi yang terbaik, umumnya faktor keberhasilan adalah jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan potensi dan situasi penduduk desa yang bersangkutan, seperti usaha ternak kerbau/sapi yang sudah biasa dilakukan, atau kelompok usaha pertanian jagung dllnya, umumnya berhasil dengan baik.

Meskipun telah dilakukan lomba Pokmas IDT, dampak lomba pokmas IDT terbaik tidak begitu berpengaruh atau kecil sekali. Karenanya, keberhasilan program IDT di Lampung Utara tidak mencapai 50%. Padahal setiap desa IDT telah menerima bantuan Rp.60 juta selama tiga tahun. Yang jelas data dari BKKBN keluarga miskin di Lampung Utara jumlahnya meningkat. Sedangkan jumlah desa IDT, dari data BPS jumlahnya menurun, itu disebabkan adanya peningkatan perbaikan sarana dan prasarana desa. Mayun Sulki mengusulkan agar sebelum bantuan disalurkan ke desa, tenaga pendamping terlebih dahulu sudah ada di desa. Tenaga pendamping itu betul-betul mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi desa dan mempunyai komitmen untuk membangun desa–desa miskin.

Informasi dan pelaksanaan program IDT di tingkat Kecamatan, khususnya di Kecamatan Tanjung Raja diperoleh dari Arwazier, Kepala Seksi PMD Kecamatan Tanjung Raja, dan Yuwono, Kepala Sub Seksi PMD Kecamatan Tanjung Raja. Menurut

mereka perkembangan jumlah desa IDT, Pokmas, Kepala Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin, penerima dana bantuan program IDT di Kecamatan Tanjung Raja selama 5 tahun (tahun anggaran 1994/1995 s.d 1998/1999) adalah seperti terlihat pada Tabel IV.3. Sedangkan jumlah prosentase jenis usaha yang dikembangkan oleh Kepala Keluarga Miskin penerima dana bantuan IDT di Kecamatan Tanjung Raja selama 5 tahun (tahun anggaran 1994/1995 s.d 1998/1999) seperti terlihat pada Tabel IV.4.

Tabel IV.3

Jumlah Desa IDT, Pokmas, Kepala Keluarga Miskin dan Penduduk Miskin Penerima Dana Bantuan Program IDT di Kecamatan Tanjung Raja Tahun 1994/1995 – 1998/1999

Tahun Pelaksanaan Bantuan IDT	Jumlah Desa IDT	Jumlah Pokmas IDT	Jumlah K K Miskin	Jumlah Jiwa Penduduk Miskin
Th. 1994/1995	8	33	795	2.383
Th. 1995/1996	8	33	785	3.285
Th. 1996/1997	9	27	521	1.985
Th. 1997/1998	1	3	64	289
Th. 1998/1999	1	2	50	257

Sumber Data: PMD Kabupaten Lampung Utara, 1999

Tabel IV.4
 Jenis Usaha Yang Dikembangkan Kepala Keluarga Miskin
 Penerima Dana Bantuan Program IDT
 Di Kecamatan Tanjung Raja
 Th. 1994/1995 – 1998/1999

No	Kategori Jenis Usaha	Th.94/95 % (N=795)	Th.95/96 % (N=785)	Th.96/97 % (N=521)	Th.97/98 % (N=64)	Th.98/99 % (N=50)
1	Pertanian	42,89	46,37	57,77	65,63	4,00
2	Peternakan (sapi/kerbau/ kambing/domba/itik/ ayam)	53,21	40,51	12,67	14,06	64,00
3	Perdagangan/jasa	3,90	12,74	24,19	20,13	32,00
4	Industri Kecil (bata, mebel dll)	-	0,25	0,38	-	-
5	Lain-lain	-	0,13	4,99	-	-
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data: PMD Kabupaten Lampung Utara, 1999

Prosedur untuk mendapatkan dana bantuan IDT di Kecamatan Tanjung Raja, menurut Yuwono adalah sebagai berikut:

- *Pertama*, masyarakat calon penerima bantuan IDT diminta membentuk kelompok, kemudian memilih pengurus dan menetapkan anggota, nama kelompok usaha, dan menentukan jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh kelompok. Dalam tahap ini dibantu oleh Kepala Desa dan LKMD.
- *Kedua*, Kepala Desa bersama LKMD, pengurus kelompok dan masyarakat calon penerima bantuan mengadakan musyawarah desa untuk menyusun proposal.
- *Ketiga*, hasil musyawarah desa berupa proposal selanjutnya di sahkan oleh pembina desa (Kepala Desa dan LKMD).
- *Keempat*, selanjutnya proposal dibawa ke kantor Kecamatan untuk disahkan Camat selaku koordinator Kecamatan.
- *Kelima*, setelah proposal disahkan Camat, proposal dikirim ke BRI, dan dana bantuan sudah dapat dicairkan oleh pengurus kelompok masing-masing.

- *Keenam*, proposal kegiatan masing-masing kelompok usaha dikirim ke PMD Kabupaten untuk mendapatkan pengesahan. Dan PMD Kabupaten diadakan Rakorbang untuk mengesahkan, dan itu juga dianggap sebagai laporan perkembangan kegiatan. Setelah dana bantuan keluar atau diterima oleh masing-masing kelompok. PMD Kecamatan sebenarnya hanya menerima laporan, dan tidak mengetahui apa sampai atau tidak kepada anggota kelompok yang berhak menerimanya.

Jumlah dana bantuan program IDT yang telah disalurkan kepada masyarakat miskin IDT di Kecamatan Tanjung Raja selama 5 tahun (1995/1995-1998/1999) berjumlah Rp.540.000.000,-. Dari jumlah tersebut, berdasarkan informasi dari kantor PMD Kabupaten Lampung Utara dan PMD Kecamatan Tanjung Raja belum ada yang mengangsur atau mengembalikan dan menggulirkan dana bantuan IDT yang diberikan kepada masyarakat lain yang memerlukan.

Faktor penyebabnya, menurut Yuwono, antara lain: usaha pertaniannya tidak berhasil (panen gagal) akibat kekeringan/kemarau panjang, serangan hama belalang/tikus; Jenis tanaman yang dianjurkan tidak cocok, karena masyarakat belum memahami tata cara bercocok tanam, seperti jenis tanaman nilam, ada yang berhasil tetapi pemasarannya sulit; Binatang ternak mati terserang penyakit kurap/rabun khususnya kambing, atau dijual sebelum waktunya; Adanya anggapan masyarakat penerima bantuan bahwa dana bantuan itu memang sejak semula oleh petugas tidak dianjurkan untuk dikembalikan/digulirkan (salah mensosialisasikannya). Dan ada pula masyarakat menganggap pemerintah memberikan dana cuma-cuma untuk membantu masyarakat miskin; Program kebiatan terlalu ditentukan dari atas, bukan berdasarkan keinginan masyarakat; Kurangnya pembinaan dan pengawasan oleh petugas, dan peran tenaga pendamping hanya awal tahun pertama program IDT diperkenalkan. Bahkan banyak desa penerima bantuan IDT yang tidak mendapat tenaga pendamping. Hal lain adalah, kurangnya memahami dan mempelajari keadaan masyarakat setempat sebelum bantuan diberikan kepada masyarakat miskin penerima dana bantuan IDT.

Sedang faktor kemiskinan di daerah ini, menurut Yuwono faktor penyebab kemiskinan di daerah ini antara lain: Terbatasnya pemilikan lahan usaha pertanian; Tingkat kesuburan tanah makin lama makin menurun; Terbatasnya kemampuan berusaha karena kekurangan modal; Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan usaha dan belum menetrapkan teknologi pertanian pertanian (masih dikelola secara tradisional); Jumlah tanggungan keluarga dari tahun ke tahun terus meningkat, sementara penghasilan/pendapatan makin menurun; Rendahnya motivasi untuk bekerja (malas) dan adanya kecenderungan penduduk disini konsumtif bila mendapatkan penghasilan.

Atas dasar itu, Yuwono menyampaikan saran dan harapannya, yaitu pentingnya memahami terlebih dahulu bagaimana mengubah peran aparat desa (Kades/LKMD dll) yang dalam pelaksanaan bantuan pengentasan kemiskinan begitu besar dan menentukan, baik dalam memilih anggota kelompok, pengurus kelompok, dan jenis usaha kelompok. Dan ini sangat sulit untuk mengubahnya. Karena itu perlu ditertibkan kembali nama-nama anggota yang pernah menerima bantuan oleh aparat desa. Sebab dalam kenyataannya, banyak anggota masyarakat yang menerima lebih dari satu program bantuan, di lain pihak terdapat anggota masyarakat yang belum pernah menerima bantuan apapun, pada hal mereka layak menerimanya.

Menurut Yuwono, kebijakan pemerintah tentang program bantuan pengentasan kemiskinan itu bagus, jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Masalahnya, terletak dalam pelaksanaannya. Ia mengharapkan semua bantuan program pengentasan kemiskinan untuk tingkat kecamatan melalui satu pintu, tidak seperti sekarang ini masing-masing sektor berjalan sendiri-sendiri tidak terkoordinasi. Setelah terjadi kasus atau masalah, baru kecamatan dilibatkan. Hal lain, untuk merubah pola perilaku masyarakat, perlu dilakukan penyuluhan dan pelatihan serta penerangan dari berbagai instansi terkait kepada masyarakat miskin.

Mengenai Program Takesra dan Kukesra, menurut Drs. Yun Basri, Kepala Seksi Kependudukan Bidang Keluarga Sejahtera Kanwil. BKKBN Lampung menyatakan program Takesra dan Kukesra di Provinsi Lampung sudah berjalan tiga tahun (sejak tahun 1996) dan diperuntukkan untuk desa/kelurahan non IDT yang jumlahnya 542.008 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan untuk desa IDT baru diintervensi bulan Maret 1998.

Wilayah desa IDT sebelumnya diintervensi oleh kantor Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Lampung dan di daerah tingkat II (Kabupaten/Kotamadya).

BKKBN dalam setiap (1 Januari s.d 31 Desember) melakukan pendataan penduduk yang tergolong keluarga Sejahtera (PS), Keluarga Sejahtera I (KS-I), KS-II, KS-III dan KS-III plus. Kriteria penentuan keluarga Pra Sejahtera, KS-I, KS-III, dan KS-III plus berbeda dengan yang ditentukan oleh BPS.

Indikator Keluarga Sejahtera yang dikeluarkan oleh kantor BKKBN Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, yaitu:

- (1) Kadangkala makan hanya sekali sehari;
- (2) Memiliki pakaian yang sama untuk di rumah dan bepergian;
- (3) Lantai rumah dari tanah;
- (4) Anak sakit tidak dibawa ke medis/dokter/puskesmas;
- (5) Anggota keluarga tidak menjalankan ibadah agamanya.

Keluarga Sejahtera I (KS-I) adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya (*socio psychological needs*), yaitu:

- (1) Minimal makan dua kali sehari;
- (2) Memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah dan bepergian;

- (3) Lantai rumah bukan dari tanah;
- (4) Anak sakit dibawa ke medis/dokter/puskesmas;
- (5) Anggota keluarga menjalankan ibadah agamanya.

Keluarga Sejahtera II (KS-II) adalah:

- (1) Minimal seminggu sekali menyediakan lauk daging, telur;
- (2) Satu tahun minimal mempunyai 1 stel pakaian baru;
- (3) Luas rumah minimal 8 M untuk setiap penghuni rumah;
- (4) Anggota keluarga yang berusia 60 tahun ke bawah bisa baca tulis latin;
- (5) Anak umur 5 – 15 tahun bersekolah;
- (6) Minimal salah satu anggota keluarga mempunyai penghasil tetap;
- (7) Dalam 3 bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat;
- (8) 8. Anak hidup 2 orang, keluarga PUS pakai kontrasepsi;
- (9) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur.

Keluarga Sejahtera III (KS-III) adalah:

- (1) Mempunyai tabungan keluarga;
- (2) Minimal satu hari satu kali makan bersama yang digunakan untuk komunikasi antar keluarga;
- (3) Salah satu anggota keluarga aktif dalam kegiatan masyarakat;
- (4) Minimal 6 bulan sekali mengadakan rekreasi bersama keluarga;
- (5) Memperoleh informasi dari radio/TV/Surat Kabar;
- (6) Mudah dalam memperoleh sarana transportasi;
- (7) Ada upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang agama.

Keluarga Sejahtera III (KS-III) plus adalah:

- (1) Aktif dalam memberikan sumbangan materiil secara rutin;
- (2) Aktif sebagai pengurus dalam salah satu organisasi masyarakat.

Menurut Yun Basri, hasil pendataan tentang tahapan keluarga di Kabupaten Lampung yang dilakukan oleh kantor BKKBN Lampung Utara pada tahun 1998 dan 1999, menunjukkan Keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) di Kabupaten Lampung Utara terjadi peningkatan. Pada tahun 1998 jumlah keluarga

Pra Sejahtera (PS) adalah 79.621 KK (43,48%) dan pada tahun 1999 meningkat menjadi 93.316 KK (47,40%). Begitu pula keluarga sejahtera I (KS-I) tahun 1998 berjumlah 56.402 KK (30,80%) dan pada tahun 1999 meningkat menjadi 62.739 KK (31,87%). Sebaliknya, jumlah Keluarga Sejahtera II (KS-II), Keluarga Sejahtera III (KS-III) dan Keluarga Sejahtera III (KS-III) plus terjadi penurunan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.5.

Keadaan ini memperlihatkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Utara dalam dua tahun terjadi peningkatan yang cukup berarti. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah setempat maupun pemerintah pusat. Mengingat berbagai intervensi dana bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Lampung cukup besar dan beragam, termasuk program bantuan Takesra dan Kukesra.

Tabel IV.5

Jumlah Kepala Keluarga Pra Sejahtera (PS), Keluarga Sejahtera I (KS-I), Keluarga Sejahtera II (KS-II), Keluarga Sejahtera III (KS-III) dan Keluarga Sejahtera III (KS-III) Plus di Kabupaten Lampung Utara Tahun 1998 dan 1999

No	Kategori Tahapan Keluarga	Tahun 1998		Tahun 1999	
		F	(%)	F	(%)
1	Pra Sejahtera (PS)	79.621	(43,48)	93.316	(47,40)
2	Keluarga Sejahtera I (KS-I)	56.402	(30,80)	62.739	(31,87)
3	Keluarga Sejahtera II (KS-II)	38.422	(20,98)	34.640	(7,60)
4	Keluarga Sejahtera III (KS-III)	8.272	(4,52)	5.852	(2,97)
5	Keluarga Sejahtera III (KS-III) plus	390	(0,22)	310	(0,16)
Total		183.107	(100,00)	196.857	(100,00)

Sumber Data: Diolah dari data Kantor BKKBN Lampung Utara

Program Takesra bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keluarga terutama keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) dalam bidang pemupukan modal usaha melalui tabungan dengan memanfaatkan jasa pelayanan perbankan dan jasa pelayanan pos serta jasa pelayanan lain yang turut peduli terhadap kegiatan Takesra. Melalui program Takesra diharapkan dapat meningkatkan kesadaran keluarga untuk gemar menabung. Meningkatkan pengenalan dan pemanfaatan jasa perbankan dan jasa perposan oleh keluarga. Membantu para keluarga terutama Pra Sejahtera (PS) dan KS-I agar dapat menghimpun dana guna membangun keluarganya, serta menghimpun dana masyarakat untuk mendukung pembangunan keluarga sejahtera (Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 1997:7).

Jumlah kelompok Takesra desa/kelurahan non IDT di Kabupaten Lampung Utara hingga tanggal 31 Mei 1999 berjumlah 5.152 kelompok dengan anggota berjumlah 75.490 KK. Pemerintah telah mendropping dana bantuan sebesar Rp.152.678.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.150.980.000,- atau 98,89%. Jumlah saldo Takesra non IDT yang terhimpun di BNI/Kantor Pos Kabupaten Lampung Utara hingga 31 Mei 1999 berjumlah Rp.776.637.199,- dengan jumlah bunga Takesra sebesar Rp.7.161.692,-. Sedangkan jumlah kelompok Takesra desa/kelurahan IDT di Kabupaten Lampung Utara per tanggal 31 Mei 1999 adalah 1.096 kelompok dengan anggota berjumlah 16.367 KK. Pemerintah telah mendropping dana bantuan sebesar Rp.118.164.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.32.734.000,- atau 27,70%.

Rendahnya realisasi dana bantuan pemerintah di desa IDT terutama disebabkan kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota Takesra; Letak kantor pos/BNI yang jauh dari desa; Pendapatan masyarakat rendah; dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menabung atau menggunakan jasa perbankan/pelayanan pos.

Kukesra merupakan bantuan modal kerja dalam bentuk tunai yang bertujuan membantu Keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga

Sejahtera I (KS-I) alasan ekonomi untuk meningkatkan tahapan keluarga sejahtera melalui kegiatan ekonomi produktif dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan.

Kukesra bertujuan untuk membantu keluarga untuk mendapatkan modal usaha dengan syarat ringan, mudah dan cepat. Merangsang kesadaran, motivasi dan semangat keluarga untuk berwirausaha. Membantu keluarga mengembangkan kegiatan kemitraan usaha dalam bidang ekonomi. Meningkatkan pengenalan dan pemanfaatan jasa perbankan dan pelayan pos oleh keluarga (Kantor Menteri Negara Kependudukan/ BKKBN, 1997: 7).

Proses mendapatkan bantuan dana Kukesra di Kabupaten Lampung Utara, menurut Fachmida, SH, Kepala BKKBN Lampung Utara mengemukakan Setelah diketahui data keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) di desa yang bersangkutan, petugas PL KB bersama pamong desa membentuk kelompok usaha dan menetapkan pengurus kelompok berikut anggotanya. Pengurus dan anggota kelompok harus menjadi akseptor KB. Kemudian membuat usulan kegiatan usaha (proposal). Selanjutnya proposal diajukan ke Bank yang ditunjuk, dan dana pinjaman dapat dikucurkan.

Jumlah bantuan Kukesra untuk setiap KK pada tahap pertama Rp.20.000,-. Apabila sudah melunasi angsurannya, pada tahap kedua memperoleh bantuan Rp.40.000,-, dan setelah 6 bulan lancar pengembaliannya, maka jumlah bantuan dinaikkan menjadi Rp.80.000,- dan seterusnya menjadi Rp.160.000,- hingga Rp.320.000,-.

Data jumlah keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) non IDT di Kabupaten Lampung Utara hingga tanggal 31 Mei 1999 yang telah menjadi anggota Kukesra adalah berjumlah 44.477 K, terhimpun dalam 3.032 kelompok. Bantuan dana yang disiapkan oleh pemerintah melalui kantor cabang BNI Kotabumi berjumlah Rp.1.884.404.362,-.

Dari jumlah tersebut, bantuan dana pinjaman yang telah dimanfaatkan/dialurkan kepada masyarakat/anggota Kukesra non IDT di Kabupaten Lampung Utara hingga tanggal 31 Mei 1999 berjumlah Rp.1.876.591.657,- atau 99,59%. Sisanya sebesar Rp.7.812.705,- atau 0,41% belum direalisasikan. Jumlah angsuran yang telah diterima oleh kantor cabang BNI Kotabumi dari anggota Kukesra non IDT di Kabupaten Lampung Utara hingga 31 Mei 1999 berjumlah Rp.133.716.666 dan jumlah bunga yang diterima Rp.2.929.754,-. Sedangkan jumlah tunggakan angsuran anggota Kukesra non IDT di Kabupaten Lampung Utara hingga 31 Mei 1999 berjumlah Rp.418.310.453,- dan tunggakan bunga angsuran Kukesra Rp.7.350.426,-. Dengan demikian, jumlah tunggakan pengembalian pinjaman Kukesra non IDT di Kabupaten Lampung Utara cukup tinggi dibandingkan dengan mereka yang telah mengangsur. Jika dihitung berdasarkan jumlah angsuran ditambah bunga, maka perbandingannya 24,30% (Rp.136.643.420,-) jumlah angsuran yang diterima dan 75,70% (Rp.425.660.870,-) jumlah tunggakan (**Sumber Data:** Kantor Cabang BNI Kotabumi, 31 Mei 1999).

Data jumlah keluarga Pra sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) desa IDT di Kabupaten Lampung Utara yang menjadi anggota Kukesra hingga tanggal 31 Mei 1999 adalah berjumlah 7.096 KK, terhimpun dalam 477 kelompok. Bantuan dana pinjaman yang disiapkan oleh pemerintah melalui kantor cabang BNI Kotabumi sebesar Rp.176.114.661,- .

Dari jumlah tersebut, bantuan dana pinjaman yang telah dimanfaatkan/dialurkan kepada masyarakat/anggota Kukesra desa IDT di Kabupaten Lampung Utara hingga 31 Mei 1999 berjumlah Rp.175.445.000,- atau 99,62%. Sisanya sebesar Rp.669.661 atau 0,38% belum direalisasikan. Adapun jumlah angsuran Kukesra desa/kelurahan IDT di Kabupaten Lampung Utara yang telah diterima hingga 31 Mei 1999 adalah Rp.13.245.000,- dan jumlah bunga Kukesra yang diterima sebesar Rp.190.615,-. Sedangkan jumlah tunggakan angsuran Kukesra desa/kelurahan IDT di Kabupaten Lampung Utara hingga 31 Mei 1999 sebesar Rp.9.285.000,- dengan

bunga tunggakan Rp.116.124,- (**Sumber Data:** Kantor Cabang BNI Kotabumi, 31 Mei 1999).

Dengan demikian jumlah tunggakan angsuran Kukesra desa/kelurahan IDT di Kabupaten Lampung Utara masih cukup tinggi, namun lebih rendah dari wilayah desa/kelurahan non IDT. Jika dibandingkan antara angsuran yang diterima ditambah bunga yang diterima dengan jumlah yang menunggak ditambah bunga tunggakan, maka perbandingannya adalah 58,83% (Rp.13.435.615,-) jumlah yang diterima, sedangkan jumlah tunggakan adalah 41,17% (Rp.9.401.124,-).

Data lain mengenai tunggakan Kukesra di Kabupaten Lampung Utara dari Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Lampung Utara melalui suratnya Nomor: 3108/PD.302/J.4/1999, tanggal 21 April 1999 yang menyatakan bahwa tunggakan Kukesra di Kabupaten Lampung Utara hingga bulan Maret 1999 sudah mencapai titik yang sangat rawan, yakni sebesar Rp.370.144.794,- atau sebesar 10% dari jumlah dana yang diserap. Untuk desa non IDT dari dana terserap sebesar Rp.3.480.920.000,- jumlah tunggakan Kukesra pokok Rp.349.500.455,- atau 10,04% dan jumlah tunggakan bunga Kukesra sebesar Rp.5.866.806,-. Sedang desa IDT, dari jumlah dana terserap sebesar Rp.219.840.000,- dengan jumlah tunggakan Kukesra pokok Rp.14.595.000,- atau 6,64%, dan jumlah tunggakan bunga sebesar Rp.182.533,-.

Menurut Yun Basri, Kepala Seksi Kependudukan Bidang Keluarga Sejahtera Kanwil. BKKBN Lampung, masalah Kukesra adalah perkembangannya agak lambat, karena dana kredit yang diberikan kepada keluarga miskin relatif kecil. Juga, tidak terlepas dari akibat krisis yang berkepanjangan.

Pendapat lain, Drs. Widya Suwardi, Kepala Bidang Bina Program Kanwil. BKKBN Lampung, yang menyatakan pada prinsipnya kita mengikuti kebijakan nasional pengentasan kemiskinan yang telah ditetapkan. Namun, dalam perkembangannya khususnya di daerah Lampung terdapat kebijakan daerah melalui program MPMK-

DMSS, dan kita harus menyesuaikan. Selain itu, program pengentasan kemiskinan melibatkan berbagai instansi dengan berbagai programnya.

Ia lebih lanjut mengemukakan, permasalahan utama program Taksera dan Kukesra di Provinsi Lampung adalah, keluarga penerima bantuan SDM-nya rendah, sehingga tidak mempunyai kemampuan mengelola atau memanfaatkannya. Hal lain, tidak didukung kemampuan memasarkan produk yang dihasilkan, sehingga tidak bisa merebut pasar. Meskipun kita melakukan kemitraan, tetapi ternyata mitra yang ditunjuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga sedikit sekali upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Faktor lain, terdapat kepala desa/pamong desa yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan sendiri, bahkan terdapat bantuan kredit yang tidak sampai pada keluarga yang menjadi sasarannya. Terdapat pula pengurus kelompok atau anggota kelompok yang ingin menguasai sendiri. Juga disebabkan usaha yang dilakukan oleh keluarga penerima bantuan tidak berhasil/gagal.

Menurut Widya Suwardi, hal yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah adalah persoalan perbedaan penentuan kriteria keluarga/penduduk miskin antara BKKBN dengan BPS. Masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya. Apalagi di daerah Lampung keadaan penduduk miskin agak berbeda dengan daerah lain. Misalnya keadaan rumah penduduk yang lantainya terbuat dari tanah, belum tentu miskin. Karena ternyata mereka memiliki TV, Parabola, kendaraan dllnya. Lebih-lebih dengan naiknya harga lada, kopi dan coklat. Masyarakat yang semula miskin menjadi tidak miskin karena pendapatannya meningkat.

Fachmida, SH, Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Lampung Utara menyatakan kelemahan yang paling mendasar dari pelaksanaan Kukesra adalah kelompok yang dibentuk belum siap dengan usahanya. Data keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang dibuat kelompok kadangkala tidak sesuai dengan kenyataannya.

Umumnya kelompok usaha yang berhasil adalah peran petugas lapangan yang mampu membina dan memonitor kelompok usaha.

Pembinaan itu dilakukan melalui pertemuan setiap minggu di desa penerima bantuan dengan melibatkan 3 komponen, yaitu: Pamong desa/aparat desa; Petugas PL KB dan Tenaga medis serta petugas Posyandu. Di samping itu, peran kelompok itu sendiri sendiri yang rutin setiap minggu mengadakan pertemuan. Peran tokoh masyarakat/tokoh agama di desa yang mengawasi kelompok usaha yang dibentuk. Sedangkan peran kantor BKKBN Lampung Utara dalam setiap bulan mengadakan pertemuan dengan kelompok-kelompok usaha yang dibentuk. Tujuan pertemuan ini adalah untuk tukar menukar informasi diantara pengurus kelompok atas kegiatan usaha yang dilakukan, baik yang berhasil ataupun tidak. Dan mereka menceritakan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya yang dapat mereka lakukan dalam mengatasinya.

BAB V

PANDANGAN MASYARAKAT DESA SINAR JAYA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM TASKIN

Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masyarakat miskin, dalam studi ini diperoleh gambaran tentang pandangan masyarakat di desa Sinar Jaya, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah mengenai program bantuan masyarakat miskin yang pernah diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin di desa Sinar Jaya.

Jumlah responden adalah 51 kepala keluarga. Kepada mereka diajukan daftar pertanyaan semia terbuka, antara lain mencakup latar belakang sosial ekonomi, yaitu: usia; jenis kelamin; status perkawinan; suku bangsa; tempat lahir; pendidikan formal dan non formal; pekerjaan utama dan sampingan; jumlah penghasilan dan pengeluaran rata-rata perbulan; kepemilikan lahan dan harta benda; program bantuan yang pernah diterima berikut pandangan mereka terhadap berbagai bantuan yang diberikan, serta saran dan harapan mereka untuk pelaksanaan program bantuan masyarakat miskin di masa mendatang.

A. Latar Belakang Sosial Ekonomi

Dari 51 kepala keluarga di desa Sinar Jaya yang dijadikan responden, diperoleh gambaran sebagai berikut:

Umur responden sebagian besar (84,31%) berumur antara 26 – 50 tahun merupakan umur produktif. Sisanya 15,69% berumur 51 tahun ke atas. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel V.1. Jenis kelamin responden sebagian besar (96,08%) laki-laki, dan sisanya 3,92% perempuan. Pada umumnya responden berstatus menikah, hanya

1 responden yang belum menikah tetapi sebagai kepala keluarga. Berdasarkan suku bangsa, terdapat 30 responden (58,82%) adalah suku Sunda; 10 responden (19,61%) suku Jawa; 7 responden (13,73%) suku Semendo; 3 responden (5,88%) suku Lampung, dan sisanya 1 responden suku Ogam.

Tabel V.1
 Responden Menurut Kelompok Umur
 (N=51)

No.	Kelompok Umur	Jumlah	
		F	%
1	25 tahun ke bawah	6	11,76
2	26 – 30 tahun	9	17,65
3	31 – 35 tahun	10	19,61
4	36 – 40 tahun	10	19,61
5	41 – 45 tahun	6	11,76
6	46 – 50 tahun	2	3,92
7	51 – 55 tahun	1	1,96
8	56 tahun ke atas	7	13,73
Total		51	100,00

Sumber Data: Diolah dari data lapangan tahun 1999.

Tempat lahir responden cukup bervariasi, terbanyak 22 responden (43,14%) di Provinsi Jawa Barat (Tasikmalaya; Pandeglang; Serang; Kuningan); 17 responden (33,33%) di Provinsi Lampung (7 responden di desa Sinar Jaya; 4 responden desa di Kecamatan Tanjung Raja; 3 responden luar Kecamatan Tanjung Raja tetapi dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara; dan 3 responden luar Kabupaten Lampung Utara tetapi dalam wilayah Provinsi Lampung). Sisanya, 6 responden (11,76%) Provinsi Jawa Timur; 4 responden (7,84%) Provinsi Sumatera Selatan; dan masing-masing 1 responden dari Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tingkat pendidikan responden sangat rendah, yaitu 58,86% SD sederajat tidak tamat dan 23,53% SD sederajat tamat. Selengkapnya dapat dilihat Tabel V.2. Diantara responden juga

mengikuti pendidikan non formal, yaitu: P4, pertanian, pengairan, montir, perikanan, menjahit, dan lain-lain.

Keadaan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang sangat terbatas ini tampaknya mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan berbagai bantuan pengentasan kemiskinan yang diberikan oleh pemerintah. Paling tidak penjelasan mengenai arti penting bantuan yang diberikan tidak serta merta mereka pahami.

Tabel V.2
Responden Menurut Pendidikan Formal
(N = 51)

No	Kategori Pendidikan	Jumlah	
		F	%
1	Tidak sekolah	1	1,96
2	SD sederajat tidak tamat	29	56,87
3	SD sederajat tamat	12	23,53
4	SLTP sederajat tidak tamat	2	3,92
5	SLTP sederajat tamat	4	7,84
6	SLTA sederajat tidak tamat	-	-
7	SLTA sederajat tamat	3	5,88
Total		51	100,00

Sumber Data: Diolah dari data lapangan tahun 1999

Dari segi pekerjaan utama yang ditekuni responden, sebagian besar (78,43%) adalah petani dan 9,80% buruh tani. Sisanya, terdapat 2 responden sebagai petani penggarap; 2 responden tukang, dan masing-masing 1 responden pedagang kecil/warung dan PNS/guru SD.

Dari 51 responden, diantaranya terdapat 29 responden memiliki pekerjaan samping sebagai buruh harian, buruh tani, hansip, guru honor, pedangan kecil/warung dan lain-lain. Keadaan ini rupanya mempunyai pengaruh terhadap tingkat pendapatan mereka rata-rata perbulan. Sebagian besar (56,86%) berpenghasilan Rp.250.000,- ke bawah rata – rata perbulan. Sisanya 43,14% berpenghasilan di atas Rp.250.000,0 rata-rata perbulan. Sedangkan

tingkat pengeluaran mereka rata-rata perbulan cenderung menyesuaikan dengan pendapatan yang diterima. Tingkat pendapatan dan pengeluaran rata-rata perbulan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel V.3.

Tabel V.3
 Responden Menurut Pendapatan dan Pengeluaran

No	Pendapatan Rata-Rata Perbulan	Jumlah F (%)	Pendapatan Rata-Rata Perbulan	Jumlah F (%)
1	Rp.100.000 ke bawah	5 (9,80)	Rp.100.000 ke bawah	4 (7,84)
2	Rp.100.001-Rp.150.000	13 (25,49)	Rp.100.001-Rp.150.000	12 (23,53)
3	Rp.150.001-Rp.200.000	8 (15,69)	Rp.150.001-Rp.200.000	9 (17,65)
4	Rp.200.001-Rp.250.000	3 (5,88)	Rp.200.001-Rp.250.000	6 (11,76)
5	Rp.250.001-Rp.300.000	3 (5,88)	Rp.250.001-Rp.300.000	2 (3,92)
6	> Rp.300.000	19 (37,26)	> Rp.300.000	18 (35,30)
Total		51 (100,00)	Total	51 (100,00)

Sumber Data: Diolah dari data lapangan 1999

Terdapatnya perbedaan tingkat pendapatan responden erat kaitannya dengan kepemilikan lahan pertanian. Dari 51 responden , diantaranya 10 responden tidak memiliki lahan pertanian; 4 responden memiliki luas lahan pertanian kurang dari ½ hektar; 10 responden antara ½ hektar - < 1 hektar; 11 responden antara 1 hektar - < 1 ½ hektar; 3 responden antara 1 ½ hektar - < 2 hektar; dan sisanya 13 responden memiliki lahan pertanian 2 hektar ke atas.

Jika hal ini dihubungkan dengan jumlah tanggungan keluarga, terdapat 15 responden (29,41%) mempunyai tanggungan antara 1 – 3 orang; 17 responden (33,33%) mempunyai tanggungan antara 4 – 5 orang; 14 responden (27,45%) mempunyai tanggungan antara 6 – 7 orang; dan sisanya 5 responden (9,80%) mempunyai tanggungan lebih dari 7 orang. Dengan lain perkataan masih cukup banyak mereka yang mempunyai tanggungan lebih dari 5 orang.

Kondisi rumah tinggal mereka terdapat diantaranya 18 responden yang rumahnya berlantai tanah; 3 responden berlantai papan; 3 responden berlantai bambu. Sisanya 27 responden rumahnya berlantai semen. Luas lantai rumah tinggal mereka, 21 responden (41,18%) dengan luas 50 M² ke bawah; 15 responden (29,41%) antara

51 M² – 75 M²; 2 responden (3,92%) antara 76 M² – 100 M²; 4 responden (7,84%) antara 101 M² – 125 M²; dan sisanya 9 responden (17,65%) luas lantai rumah di atas 125 M². Sedangkan dinding rumah tinggal mereka, diantaranya 21 responden (41,18%) terbuat dari papan; 19 responden (37,25%) terbuat dari daun rumbia. Sisanya, 11 responden (21,57%) terbuat dari semen.

Kepemilikan harta benda, terdapat 25 responden memiliki televisi; 34 responden memiliki radio/tape; 10 responden memiliki sepeda; 18 responden memiliki sepeda motor, dan 7 responden memiliki mesin jahit.

B. Program Bantuan yang Pernah Diterima

Sebagai desa miskin di kawasan hutan lindung, desa Sinar Jaya telah menerima berbagai program bantuan dari pemerintah dan swasta, diantaranya program bantuan IDT tahun 1994/1995; program IDT tahun 1995/1996; program IDT tahun 1996/1997; program Takesra/Kukesra; program bantuan LIPI tahun 1998/1999; program bantuan PDM-DKE tahun 1998/1999; program bantuan JPS-Kesehatan (Kartu Sehat); program bantuan JPS-OPK (beras); juga keikutsertaan dalam KUT (Kelompok Usaha Tani).

Dari 51 kepala keluarga yang diteliti, diperoleh gambaran program bantuan yang pernah diterima, berikut alasan mereka menerima atau tidak menerima bantuan, serta manfaat dari bantuan yang diterima adalah sebagai berikut:

Program Bantuan IDT Tahun 1994/1995

Terdapat 10 responden dari 51 responden yang diteliti di desa Sinar Jaya pernah menerima bantuan IDT pada tahun 1994/1995. Jumlah bantuan IDT yang diterima adalah 4 responden menerima bantuan yang jumlahnya di bawah Rp.100.000,-;

2 responden menerima bantuan antara Rp.100.001 – Rp.200.000,-; dan 4 responden menerima bantuan antara Rp.200.001 – Rp.300.000,-.

Alasan menerima bantuan cukup bervariasi, yaitu 5 responden karena ingin memelihara ternak (kambing); 3 responden karena tidak mampu; 1 responden untuk membeli pupuk; dan 1 responden karena diminta oleh ketua kelompok.

Apakah bantuan IDT yang diterima responden itu bermanfaat? Dari 10 responden yang menerima bantuan IDT tahun 1994/1995 terdapat 6 responden (60%) menyatakan bermanfaat. Alasannya, karena usaha peternakan kambing berhasil (3 responden), dapat membeli pupuk untuk perkebunan/pertanian (2 responden), dan memperoleh penambahan modal untuk usaha dagangnya (1 responden). Sedangkan 4 responden (40%) menyatakan tidak bermanfaat. Alasannya, karena usaha peternakan kambing gagal/mati (2 responden), dan 2 responden menyatakan bantuan yang diberikan sangat kecil (Rp.10.000,-) tidak banyak yang dapat diperbuat dan usaha kebun jagungnya gagal diserang belalang.

Sementara 41 responden yang tidak menerima bantuan IDT tahun 1994/1995 mengemukakan alasan yang cukup bervariasi, terbanyak (12 responden) karena tidak diajak dan tidak mengetahui adanya bantuan IDT; 11 responden mengetahui tetapi tidak mengajukan usulan bantuan/tidak mau ikut menjadi peserta; 4 responden mengetahui tetapi lebih mengutamakan untuk keluarga lain yang sangat membutuhkan; 4 responden mengetahui dan membutuhkan tetapi tidak diusulkan/diajak oleh aparat desa; 3 responden mengetahui dan diajak tetapi tidak bersedia ikut serta karena takut menjadi beban hutang atau usaha tidak berjalan; 3 responden karena ingin mandiri dan kebutuhan keluarga sudah terpenuhi; 2 responden karena usia sudah tua; 1 responden menyatakan belum tinggal di desa ini; dan 1 responden tidak mengemukakan jawaban.

Program Bantuan IDT Tahun 1995/1996

Terdapat 7 responden yang pernah menerima bantuan IDT tahun 1995/1996, diantaranya 3 responden pernah menerima program bantuan IDT tahun 1994/1995.

Jumlah bantuan IDT yang diterima terdiri dari: 2 responden di bawah Rp.100.000,-; 2 responden antara Rp.100.001 – Rp.200.000,-; 1 responden antara Rp.200.001 – Rp.300.000,-; 1 responden antara Rp.300.001 – Rp.400.000; dan 1 responden antara Rp.400.001 – Rp.500.000,-.

Alasan mendapat bantuan IDT tahun 1995/1996 adalah 3 responden karena bantuan IDT sebelumnya gagal; 2 responden karena tidak mampu; 1 responden karena ingin berternak kambing; dan 1 responden karena diberikan oleh pengurus kelompok.

Apakah bantuan IDT tahun 1995/1996 yang diterima responden itu bermanfaat?

Dari 7 responden yang menerima bantuan, diantaranya 4 responden (57%) menyatakan tidak bermanfaat. Alasannya, usaha tanaman nilamnya berhasil tetapi tidak ada yang mau membelinya (3 responden) dan usaha pertaniannya gagal (1 responden). Sedangkan 3 responden (43%) menyatakan bermanfaat. Alasannya, karena usaha ternaknya berhasil (2 responden) dan pendapatannya meningkat (1 responden).

Sementara itu dari 44 responden yang tidak menerima bantuan IDT tahun 1995/1996 mengemukakan alasan yang cukup bervariasi, diantaranya 16 responden menyatakan tidak mengetahui dan tidak diajak; 10 responden mengetahui tetapi tidak diajak/diusulkan aparat desa; 7 responden mengetahui tetapi lebih mengutamakan keluarga lain yang membutuhkan; 5 responden tidak mau ikut takut banyak hutang/bebannya bertambah atau usahanya gagal; 2 responden karena belum berkeluarga; 2 responden karena belum tinggal di desa Sinar Jaya; 1 responden karena ingin hidup

mandiri dan kebutuhan keluarga sudah terpenuhi; dan 1 responden tidak mengemukakan jawaban.

Program Bantuan IDT Tahun 1996/1997

Dari 51 responden, terdapat 5 responden yang pernah menerima bantuan IDT tahun 1996/1997. Jumlah bantuan IDT yang diterima terdiri dari: 1 responden antara Rp.100.001 – Rp.200.000,-; 2 responden antara Rp.200.001 – Rp.300.000,-; 2 responden antara Rp.300.001 – Rp.400.000,-.

Alasan mendapat bantuan, 3 responden menyatakan karena tidak mampu dan hasil panen gagal akibat kemarau panjang; 1 responden ingin mendapatkan tambahan biaya membeli ternak sapi; dan responden untuk biaya membeli pupuk/saprodi.

Manfaat bantuan yang diterima, 3 responden menyatakan bermanfaat karena hasil pertanian dan ternaknya berhasil, dan 2 responden menyatakan tidak bermanfaat karena hasil pertaniannya gagal.

Sementara dari 46 responden yang tidak menerima bantuan IDT tahun 1996/1997 mengemukakan alasan yang cukup bervariasi. Diantaranya 21 responden menyatakan tidak mengetahui dan tidak diajak; 7 responden mengetahui tetapi tidak diajak/diusulkan aparat desa; 5 responden mengetahui dan diajak, tetapi tidak mau ikut karena takut banyak hutang/sudah tua/takut usahanya gagal; 3 responden ingin hidup mandiri dan kebutuhan keluarga sudah terpenuhi; 3 responden tidak diperbolehkan lagi karena telah menerima bantuan sebelumnya; 2 responden menyatakan belum tinggal di desa Sinar Jaya; 2 responden karena belum berkeluarga; dan 2 responden karena lebih mengutamakan keluarga lain yang membutuhkan; dan 1 responden tidak menjawab.

Program Bantuan Takesra/Kukesra

Dari 51 responden terdapat 4 responden yang menerima bantuan Takesra/Kukesra. Jumlah bantuan yang diterima terdiri dari: 2 responden antara Rp.200.001 – Rp.300.000,-.

Alasan mendapat bantuan Takesra/Kukesra, semuanya menyatakan karena untuk mengembangkan usaha. Sedangkan 47 responden yang tidak menerima bantuan Takesra/Kukesra mengemukakan alasan tidak mengetahui atau tidak mendengar adanya bantuan tersebut (41 responden); 3 responden mengetahui tetapi tidak mau ikut karena khawatir tidak dapat mengembalikannya; 3 responden mengetahui tetapi petunjuk dari kecamatan hanya untuk perempuan.

Manfaat bantuan yang diterima, dari 4 responden yang menerima bantuan menyatakan cukup bermanfaat untuk menambah penghasilan dan kebutuhan keluarga.

Program Bantuan LIPI Tahun 1998/1999

Terdapat 15 responden dari 15 responden yang diteliti menerima bantuan program intervensi LIPI dalam menanggulangi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998/1999.

Jumlah bantuan yang diterima adalah terdiri dari: 3 responden antara Rp.100.001 – Rp.200.000,-; 6 responden antara Rp.200.001 – Rp.300.000,-; 1 responden antara Rp.300.001 – Rp.400.000,-; 3 responden antara Rp.400.001 – Rp.700.000,-; dan 2 responden di atas Rp.700.000,-.

Alasan mendapat bantuan LIPI adalah cukup bervariasi, yaitu: 5 responden untuk biaya membeli pupuk untuk usaha pertanian/perkebunan; 4 responden untuk usaha peternakan sapi; 4 responden untuk penambahan modal usaha warung/dagang; 1 responden untuk mengembangkan usaha pemuda dibidang perbengkelan; dan 1 responden untuk usaha perikanan (tambak ikan).

Manfaat bantuan yang diterima, dari 15 responden diantaranya 5 responden menyatakan cukup bermanfaat untuk menambah penghasilan keluarga; 5 responden menyatakan cukup bermanfaat untuk usaha pertanian/perkebunan (membeli pupuk) dan usaha peternakan sapi; 5 responden menyatakan cukup bermanfaat untuk menambah modal usaha warung/dagang dan perbengkelan.

Sementara dari 36 responden yang tidak menerima bantuan LIPI mengemukakan alasan terdiri dari: 15 responden mengetahui tetapi tidak diajak; 9 responden tidak mengetahui adanya bantuan tersebut; 5 responden mengetahui tetapi tidak mau ikut serta karena punya tanggungan bantuan lain yang harus dikembalikan; 4 responden mengetahui dan diajak, tetapi tidak mau karena ingin mandiri dan keluarga sudah terpenuhi; dan 3 responden mengetahui tetapi lebih mengutamakan keluarga yang sangat membutuhkan.

Program Bantuan PDM-DKE Tahun 1998/1999

Terdapat 3 responden dari 51 responden yang diteliti pernah menerima bantuan PDM-DKE. Bantuan yang diterima adalah 1 responden menerima uang sebesar Rp.300.000,-; 1 responden menerima bantuan 500 kg pupuk dan 5 liter obat-obatan hama; dan 1 responden tidak menerima apapun hingga kini meskipun terdaftar sebagai anggota dan menjabat sekretaris kelompok.

Alasan mendapat bantuan adalah karena ditawarkan Kepala Desa dan kebetulan membutuhkan serta belum menerima bantuan lainnya. Sedang 48 responden yang tidak menerima bantuan, sebagian besar (41 responden) mengemukakan alasan tidak pernah mendengar/mengetahui adanya bantuan tersebut; 6 responden mengetahui tetapi tidak diajak ikut serta; dan 1 responden mengetahui dan diajak tetapi tidak mau ikut karena tidak mampu mengelolanya.

Manfaat bantuan yang diterima, 2 responden yang menerima bantuan menyatakan cukup bermanfaat untuk usaha pertanian/perkebunan.

Program Bantuan JPS-Kesehatan (Kartu Sehat)

Terdapat 15 responden dari 51 responden yang diteliti menerima Kartu Sehat Program JPS-Kesehatan. Sisanya 36 responden tidak menerima Kartu Sehat Program JPS-Kesehatan. Kenapa mereka tidak menerima Kartu Sehat ? Alasan yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 25 responden menyatakan tidak pernah diusulkan/diminta oleh petugas padahal keluarga kami miskin; 9 responden karena dianggap mampu; 1 responden karena dulu ikut mertua dan tidak dicantumkan; 1 responden karena PNS sudah ada ASKES.

Pemanfaatan Kartu Sehat yang diterima, dari 15 responden yang mendapat kartu sehat diantaranya 9 responden menyatakan tidak pernah dimanfaatkan karena letak Puskesmas jauh dari desa ini dan diperlukan biaya transportasi yang cukup memadai; 5 responden menyatakan belum pernah dimanfaatkan karena belum ada yang sakit; dan hanya 1 responden yang menyatakan pernah memanfaatkan.

Program JPS – OPK (Beras)

Dari 51 responden, terdapat 26 responden menyatakan pernah menerima jatah beras JPS-OPK tetapi hanya beberapa kali (antara 1 – 3 kali); 16 responden menyatakan pernah menerima dari seluruh jatah beras JPS-OPK yang ia ketahui dibagikan di desa Sinar Jaya (7 responden menyatakan antara 8 – 9 kali; 6 responden antara 4 – 5 kali; dan 3 responden antara 6 – 7 kali); dan 9 responden menyatakan tidak pernah mengambil jatah beras yang dibagikan.

Jumlah jatah beras setiap kali yang mampu mereka tebus, dari 42 responden yang pernah menerima jatah beras JPS-OPK terdapat 26 responden menyatakan antara 10 – 15 kg; 9 responden antara 16 – 20 kg; dan 7 responden lebih dari 20 kg. Harga beras JPS-OPK yang harus mereka tebus berkisar antara Rp.1.100 – hingga Rp.2.000,-.

Alasan tidak mengambil setiap kali jatah beras yang dibagikan, dari 26 responden diantaranya 9 responden menyatakan pada saat jatah beras dibagikan kebetulan tidak ada uang untuk menebusnya; 8 responden menyatakan harganya cukup mahal; 4 responden menyatakan tidak mengetahui waktu jatah beras tiba di desa; 3 responden menyatakan jatah beras diberikan kepada orang lain yang membutuhkan; 2 responden menyatakan kebetulan waktu itu panen tiba. Sedangkan 9 responden yang tidak pernah mengambil seluruh jatah beras JPS-OPK yang dibagikan, 6 responden menyatakan karena tidak membutuhkan; dan 3 responden menyatakan harganya cukup mahal dan tidak terjangkau.

Program Bantuan KUT (Kelompok Usaha Tani)

Dari 51 responden, terdapat 7 responden yang menjadi anggota KUT, sisanya 44 responden tidak menjadi anggota KUT. Alasan tidak menjadi anggota KUT, dari 44 responden diantaranya 21 responden menyatakan karena tidak diajak; 11 responden karena tidak pernah mengetahuinya; 6 responden karena tidak memiliki lahan pertanian; 3 responden karena persyaratannya begitu ketat; 3 responden karena takut tidak mampu membayarnya.

Manfaat menjadi anggota KUT dari 7 responden yang menjadi anggota KUT menyatakan karena mendapat pinjaman modal dan mudah mendapatkan pupuk/saprodi serta mendapatkan bimbingan dari PL Pertanian (4 responden), dan sisanya 3 responden hingga kini belum mendapatkan apa-apa karena baru terdaftar menjadi anggota KUT.

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Taskin

Untuk mengetahui pelaksanaan berbagai program bantuan pemerintah mengatasi masyarakat miskin. Kepada responden

diajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pandangan tentang pelaksanaan berbagai program bantuan pemerintah yang pernah diberikan kepada masyarakat miskin di desa Sinar Jaya.

Dari 52 responden hampir separuhnya (45,10%) menyatakan sasarannya tidak tepat akibat seleksinya tidak ketat, dan 19,60% menyatakan program bantuan bagus, tetapi pemanfaatan oleh masyarakat kurang baik karena kurang adanya pembinaan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel. V.4

Tabel V.4
Pandangan Responden Tentang Pelaksanaan Program Bantuan
Pemerintah Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Sinar Jaya
(N = 51)

No	Kategori Pandangan	Jumlah (F)	Jumlah (%)
1	Sasarannya tidak tepat akibat seleksi yang tidak ketat (ada yang mampu tetapi tidak mendapatkan bantuan, ada yang tidak mampu tetapi tidak mendapatkan, mereka yang mendapatkan dekat dengan aparat desa/pengurus kelompok/ditentukan aparat desa)	23	45,10
2	Program bantuan bagus, tetapi pemanfaatan oleh masyarakat kurang baik karena kurang adanya pembinaan	10	19,60
3	Aparat desa tidak terbuka	6	11,77
4	Cukup bagus dan merata	6	11,77
5	Baik karena dapat meningkatkan pendapatan	2	3,92
6	Sebaiknya bantuan dalam bentuk barang	2	3,92
7	Prosesnya mudah dan bunganya rendah	1	3,92
8	Dahulu bagus sekarang kurang merata	1	3,92
Total		51	100,00

Sumber Data: Diolah dari data lapangan 1999

Berdasarkan data di atas, secara umum pelaksanaan program bantuan terhadap masyarakat miskin masih perlu pembenahan, terutama diperlukan seleksi yang ketat terhadap kelompok atau masyarakat miskin yang akan dijadikan sasaran bantuan. Juga pentingnya keterbukaan dengan seluruh warga masyarakat atas berbagai program bantuan yang akan diberikan. Selain itu, perlu ditingkatkan pembinaan terhadap pengurus kelompok, aparat desa, dan warga masyarakat miskin penerima program bantuan.

D. Saran dan Harapan Masyarakat

Sejalan dengan pandangan yang telah dikemukakan diatas, berbagai saran dan harapan masyarakat desa Sinar Jaya tentang pelaksanaan program bantuan pemerintah terhadap masyarakat miskin di masa mendatang seperti tercermin pada Tabel. V.5.

Tabel V. 5
Saran dan Harapan Responden Terhadap Pelaksanaan Bantuan
Masyarakat Miskin Masa Mendatang Di Desa Sinar Jaya
(N=51)

No	Kategori Saran dan Harapan Pelaksanaan Program Bantuan Taskin	Jumlah F	Jumlah %
1	Perlu seleksi ketat terhadap mereka yang akan menerima bantuan, agar bantuan yang diberikan betul-betul mereka yang membutuhkan	21	41,18
2	Perlu adanya keterbukaan, baik dana bantuan yang diterima, penerima bantuan dan pengelolaan/ pemanfaatan dana bantuan	11	21,57
3	Program bantuan perlu dilanjutkan, tetapi perlu pembinaan dan pengawasan yang intensif dari pemerintah agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara baik	9	17,65
4	Sebelum bantuan diberikan/dikururkan, perlu dipelajari terlebih dahulu situasi dan kondisi masyarakat setempat	3	5,88
5	Bantuan yang diberikan sebaiknya dalam bentuk barang	3	5,88
6	Untuk sementara lebih baik bantuan di stop dulu, dan sebaiknya menertibkan bantuan yang telah ada	3	5,88
7	Tidak memberikan jawaban	1	1,96
Total		51	100,00

Sumber Data: Diolah dari data lapangan 1999.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Rangkaian masalah dan pandangan-pandangan yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, mengantarkan hasil studi ini dalam beberapa kesimpulan dan saran-saran.

Dari sisi kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat tentang program pengentasan kemiskinan, tampaknya ada usaha yang semula bersifat dari atas (*top-down*) bergeser kearah yang bersifat dari bawah (*bottom-up*). Namun dalam pelaksanaannya belum banyak mengalami perubahan. Artinya peran masyarakat miskin belum begitu terlihat dalam pelaksanaannya, terutama dalam menentukan siapa saja yang berhak mendapat bantuan program taskin; penentuan pengurus dan anggota kelompok; jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan maupun dalam hal pengawasannya. Pada sisi lain peran aparat pemerintah, baik dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten masih begitu dominan. Bahkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung dalam upaya mengatasi masyarakat miskin di Provinsi Lampung, seperti program DMSS-GKD merupakan program yang bersifat dari atas (*top-down*).

Pemerintah perlu meninjau kembali berbagai kriteria desa miskin dan keluarga miskin yang dikeluarkan oleh berbagai instansi pemerintah, seperti BPS, BKKBN dan lain-lain. Karena di dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah.

Pemerintah perlu meninjau kembali instansi-instansi mana yang berkompeten dalam menangani masalah masyarakat miskin. Kenyataan di lapangan masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri, tidak terkoordinir, dan menurut kepentingannya. Juga sistem pencapaian target tampaknya perlu dievaluasi kembali.

Peran tenaga pendamping yang berkualitas sangat diperlukan dalam membina masyarakat miskin di pedesaan. Tenaga pendamping

ini diharapkan sudah ada desa miskin sebelum dana bantuan dikururkan. Tenaga pendamping perlu mempelajari dan memahami secara lebih mendalam hal-hal yang terkait dengan potensi desa dan aspek – aspek sosial budaya dan ekonomi dari masyarakat setempat. Agar bantuan yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Di samping itu pada tingkat pedesaan sangat diperlukan seleksi yang ketat terhadap warga masyarakat miskin penerima berbagai program bantuan, juga pentingnua keterbukaan terhadap dana bantuan yang disalurkan, baik di tingkat instansi pemerintah, aparat pemerintah yang melaksanakan program bantuan, aparat desa/pamong desa, pengurus kelompok yang dibentuk, maupun kelompok masyarakat yang menjadi sasarannya. Untuk itu, sebelum program bantuan disalurkan kepada masyarakat yang menjadi sasarannya, sangat diperlukan terlebih dahulu mempelajari secara mendalam potensi dan kondisi desa yang bersangkutan, juga keadaan calon warga masyarakat penerima bantuan.

Hal lain, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap berbagai program bantuan kepada desa dan masyarakat miskin. Selam ini, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dirasakan oleh masyarakat begitu minim, seolah-olah setelah dana bantuan disalurkan, selesailah tugas dari instansi pemberi dana bantuan.

Begitu banyaknya program bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin, khususnya desa Sinar Jaya yang diteliti, menyebabkan masyarakat tingkat ketergantungannya begitu tinggi, dan masyarakat menganggap bahwa bantuan yang diberikan pemerintah adalah bersifat cuma-cuma yang tidak perlu dikembalikan atau digulirkan. Dalam hal ini sosialisasi program bantuan tampaknya masih perlu ditingkatkan, agar masyarakat mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Agar bantuan yang diberikan tidak menjadi sia-sia.

Dengan demikian, secara umum pelaksanaan program bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin perlu pembenahan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, 1996, "*Strategi Kebudayaan Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Sketsa Penjelajahan Metodologis*", dalam *Jurnal Media Inovasi*, No. 2 Th.VII-1996, Jakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Abimanyu, Anggito, 1997, "Indikator Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Studi Literatur dan Indikator Alternatif" dalam Loekman Sutrisno et.al. (Penyunting), *Pikiran-Pikiran Alternatif Pengentasan Kemiskinan Dalam Dinamika Masyarakat Menjelang abad 21*, Yogyakarta: P3PK-UGM.
- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implimentasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Bum Aksara.
- Dye, Thomas R, 1978, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.
- Jenkins, W.I., 1978, *Policy Analysis*, Oxford: Martin Robertson.
- Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun (Penyunting), 1994, *Kemiskinan Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mubiyarto, 1996, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, Jakarta: Penerbit Aditya Media.
- , 1998, *Reformasi Sistem Ekonomi (Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan)*, Yogyakarta : Penerbit Aditya Media.
- & Hartono, 1998, *Mendampingi Perkembangan Ekonomi Rakyat (Laporan Kaji Tindak Provinsi Sulawesi Tengah)*, Yogyakarta: Penerbit Aditya Media.
- PMB-LIPI, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Masa Krisis: Intervensi Program Jaring Pengamanan Sosial di*

Provinsi Lampung, D.I. Yogyakarta dan Jawa Barat, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI.

Rusli, Said dkk (Editor), 1996, *Pembangunan dan Fenomena Kemiskinan (Kasus Profil Provinsi Riau)*, Jakarta: PT. Grasindo bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Sayogyo & Pudjiwati Sayogyo, 1995, *Sosiologi Pedesaan (Kumpulan Bacaan)*, Cetakan Kesebelas, Jilid I dan 2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sinar Pagi, 5 Juli 1998

Supriatna, Tjahya, 1997, *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan* Bandung: Humaniora Utama Press.

Soedjatmoko, 1991, *Soedjatmoko dan Keprihatinan Masa Depan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

Soetrisno, Loekman, et.al. (Penyunting), 1997, *Pikiran-Pikiran Alternatif Pengentasan Kemiskinan (Dalam Dinamika Masyarakat Menjelang Abad 21)*, Yogyakarta: P3PK-UGM.

Udoji, Shief J.O., 1981, *The African Public Servant As a Public Policy in Africa*, Addis Abeba: African Association for Public Administration and Management.

Ul Haq, Mahbub, 1995, *Tirai Kemiskinan (Tantangan-Tantangan untuk Dunia Ketiga)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.